



LAPORAN KINERJA 2025

SEKRETARIAT
DIREKTORAT JENDERAL
PENGUATAN DAYA
SAING PRODUK
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

KATA PENGANTAR



Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (Setditjen PDSPKP) Tahun 2025 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi kepada para pemangku kepentingan, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Laporan ini memuat capaian kinerja, sasaran strategis, serta indikator kinerja yang telah direalisasikan oleh Setditjen PDSPKP dalam menjalankan fungsi pelayanan teknis dan administratif. Melalui laporan ini, diharapkan transparansi dan akuntabilitas kinerja organisasi dapat terus ditingkatkan guna mendukung pencapaian peningkatan kinerja Setditjen PDSPKP.

Pada Tahun 2025, kinerja Setditjen PDSPKP ditunjukkan melalui pencapaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Setditjen PDSPKP pada Tahun 2025 sebesar 110,21% (Istimewa). Capaian ini merupakan hasil kerja kolektif seluruh Tim Kerja Lingkup Setditjen PDSPKP dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel.

Kami berharap Laporan Kinerja ini dapat menjadi media pertanggungjawaban yang informatif kepada seluruh pemangku kepentingan atas pelaksanaan mandat serta capaian kinerja yang telah ditetapkan serta menjadi landasan untuk evaluasi dan perbaikan berkelanjutan. Seluruh capaian ini dibangun atas dasar internalisasi nilai-nilai organisasi #KITAPDS, yakni Kompetensi, Inovasi-Integritas, Transparansi, dan Akuntabilitas.

Jakarta, 20 Januari 2026
Sekretaris Ditjen PDSPKP

Machmud

IKHTISAR EKSEKUTIF

Berdasarkan Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2025 Sekretariat Ditjen PDSPKP memiliki 1 (satu) Sasaran Kegiatan dan 19 (sembilan belas) Indikator Kinerja Kegiatan. 3 (tiga) indikator kinerja kegiatan bersifat triwulanan, 2 (dua) bersifat semesteran, dan 14 (empat belas) bersifat tahunan.

Sebanyak 20 indikator kinerja tersebut seluruhnya telah dilakukan pengukuran pada Tahun 2025. Hasil pengukuran Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Sekretariat Ditjen PDSPKP Tahun 2025 yang ditunjukkan pada Aplikasi Kinerjaaku adalah sebesar 110,21% (Istimewa).

Pencapaian Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Sekretariat Ditjen PDSPKP Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Terdapat tiga (3) indikator kinerja yang bersifat triwulanan dan seluruhnya telah diukur hingga Triwulan III. Ketiga indikator tersebut menunjukkan capaian optimal, yakni: (1) Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Ditjen PDSPKP, (2) Pemenuhan Layanan Perkantoran Lingkup Ditjen PDSPKP, (3) Rasio Jumlah Pemberitaan Negatif terhadap Total Pemberitaan Bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan.
2. Sebanyak 2 (dua) indikator kinerja yang bersifat semesteran yaitu: (1) Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Lingkup Ditjen PDSPKP, (2) Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Ditjen PDSPKP:
3. 14 (empat belas) indikator kinerja yang bersifat tahunan yaitu (1) Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LK Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP, (2) Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Program Prioritas/Strategis Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP, (3) Nilai Pembangunan Integritas Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP, (4) Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP, (5) Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP, (6) Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP, (7) Persentase Penyelesaian Program

Penyusunan Peraturan Menteri dan keputusan Menteri Bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, (8) Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP, (9) Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP, (10) Persentase Penyelesaian Proses Bisnis Level 2 dan 3 Serta SOP Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP, (11) Nilai Proposal Inovasi Pelayanan Publik Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP, (12) Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP, (13) Persentase Penyelesaian Permasalahan Hukum Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP, (14) Persentase Dokumen Kerja Sama yang disusun/Ditindaklanjuti oleh Direktorat Jenderal PDSPKP.

4. Alokasi anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan yang dikelola (pagu anggaran awal) adalah sebesar Rp89.214.766.000 (delapan puluh sembilan miliar dua ratus empat belas juta tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah) yang seluruhnya merupakan APBN rupiah murni. Terdapat efisiensi sebesar Rp15.914.841.000 (lima belas miliar sembilan ratus empat belas juta delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah) sehingga pagu efektif Setditjen PDSPKP menjadi sebesar Rp73.299.925.000 (tujuh puluh tiga miliar dua ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah), dengan realisasi sebesar Rp71.952.023.000 (tujuh puluh satu miliar sembilan ratus lima puluh dua juta dua puluh tiga ribu rupiah), setara dengan 80,65% terhadap pagu awal dan 98,16% terhadap pagu anggaran efektif.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSKLUSIF	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN.....	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	2
C. Tugas dan Fungsi	3
D. Sumber Daya Manusia	5
E. Sistematika Penyajian LKj	5
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	6
A. Rancangan Rencana Strategis Tahun 2025-2029	6
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2025.....	7
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	9
A. Capaian Kinerja	9
B. Evaluasi dan Analisis Kinerja	12
Sasaran Kegiatan 1. Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel dalam Bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan	13
1. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Persen).....	13
2. Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LK Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Persen).....	15
3. Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Program Prioritas/Strategis Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Persen)	17
4. Nilai Pembangunan Integritas Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Nilai)	20
5. Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Nilai)	24
6. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Nilai).....	28

7. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Nilai).....	30
8. Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Nilai)	36
9. Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Indeks)	40
10. Persentase penyelesaian program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (Persen).....	43
11. Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Nilai).....	46
12. Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Persen).....	48
13. Persentase Penyelesaian Proses Bisnis Level 2 dan 3 serta SOP Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Persen).....	50
14. Nilai Proposal Inovasi Pelayanan Publik Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Nilai).....	53
15. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Persen)	56
16. Pemenuhan Layanan Perkantoran Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Layanan).....	58
17. Persentase Penyelesaian Permasalahan Hukum Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Persen).....	59
18. Persentase Dokumen Kerja sama yang disusun/ditindaklanjuti oleh Ditjen PDSPKP (Persen)	62
19. Rasio Jumlah Pemberitaan Negatif Bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan terhadap Total Pemberitaan Bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (Persen)..	69
C. Realisasi Anggaran.....	74
BAB IV PENUTUP	75
A. Kesimpulan.....	75
B. Permasalahan dan Rekomendasi.....	75
C. Tindaklanjut atas Rekomendasi Pada Laporan Kinerja Triwulan III Tahun 2025.....	75
LAMPIRAN.....	76

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Perjanjian Kinerja Sekretariat Ditjen PDSPKP Tahun 2025	7
Tabel 2. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Sekretariat Ditjen PDSPKP Tahun 2025	10
Tabel 3. Ikhtisar Pencapaian Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Ditjen PDSPKP	13
Tabel 4. Data Rekapitulasi Capaian IKU Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Ditjen PDSPKP Triwulan IV Tahun 2025	15
Tabel 5. Ikhtisar Pencapaian Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LK Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP	16
Tabel 6. Ikhtisar Pencapaian Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Program Prioritas/Strategis Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP	17
Tabel 7. Ikhtisar Pencapaian Nilai Pembangunan Integritas Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP	20
Tabel 8. Ikhtisar Pencapaian Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP.	24
Tabel 9. Ikhtisar Pencapaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP	28
Tabel 10. Ikhtisar Pencapaian Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP	31
Tabel 11. Ikhtisar Pencapaian Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP Ditjen PDSPKP	37
Tabel 12. Ikhtisar Pencapaian Indeks Profesionalitas ASN di lingkungan Setditjen PDSPKP	40
Tabel 13. Ikhtisar pencapaian Persentase penyelesaian program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (Persen).....	44
Tabel 14. Ikhtisar Pencapaian Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP	47
Tabel 15. Ikhtisar Pencapaian Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP	49

Tabel 16. Ikhtisar Pencapaian Persentase Penyelesaian Proses Bisnis Level 2 dan 3 serta SOP Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP	51
Tabel 17. Ikhtisar Pencapaian Nilai Proposal Inovasi Pelayanan Publik Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP	54
Tabel 18. Ikhtisar Pencapaian Pemenuhan Layanan Perkantoran Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Layanan).....	58
Tabel 19. Ikhtisar pencapaian Persentase Penyelesaian Permasalahan Hukum Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP	60
Tabel 20. Ikhtisar Pencapaian Persentase Dokumen Kerjasama yang Disusun/Ditindaklanjuti oleh Ditjen PDSPKP	63
Tabel 21. Ikhtisar Pencapaian Rasio Jumlah Pemberitaan Negatif Bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan terhadap Total Pemberitaan Bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan	70
Tabel 22. Rekapitulasi Jumlah Pemberitaan Ditjen PDSPKP Berdasarkan Tone Pemberitaan	73

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Jumlah Pegawai Setditjen PDSPKP Tahun 2025	5
Gambar 2	Sistematika Penyajian Laporan Kinerja Tahun 2025	5
Gambar 3.	Dashboard NKO pada SAPK Unit Kerja Sekretariat Ditjen PDSPKP Tahun 2025	9
Gambar 4.	Rapat monitoring dan evaluasi pelaporan penyaluran bantuan pemerintah Tahun 2024 dan 2025.....	19
Gambar 5.	Rapat Koordinasi Penyelesaian Permasalahan Pengisian Pada Aplikasi Satu Data Bantuan Pemerintah	20
Gambar 6.	Penyusunan Rencana Aksi RB Tematik lingkup Ditjen PDSPKP	22
Gambar 7.	Monev Pengelolaan Konflik Kepentingan dan Gratifikasi Semester II Tahun 2025 di Lingkungan Ditjen PDSPKP	23
Gambar 8.	Partisipasi Ditjen PDSPKP pada Rangkaian Kegiatan Peringatan HAKORDIA Tahun 2025.....	23
Gambar 9.	Rapat Dalam rangka Pelaporan Kinerja Organisasi Lingkup Ditjen PDSPKP	26
Gambar 10.	Rapat Verifikasi Capaian Kinerja pada Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja(SAPK) Triwulan III tahun 2025	26
Gambar 11.	Rapat penyiapan bahan laporan tahunan lingkup Ditjen PDSPKP tahun 2025.....	27
Gambar 12.	Monitoring Capaian IKPA pada Pengisian Capaian Output dan Rencana Penarikan Dana	29
Gambar 13.	Rapat Monitoring Pelaksanaan IKPA KKP pada Indikator Halaman III DIPA Periode September Tahun 2025	30
Gambar 14.	Rapat Rencana Kerja Anggaran Tahun 2026 Pagu Alokasi Anggaran	32
Gambar 15.	Rapat Pembahasan usulan revisi kewenangan KPA.....	34
Gambar 16.	Rapat membahas penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Ditjen PDSPKP Tahun 2025–2029.....	35
Gambar 17.	Kegiatan pengendalian sistem pengendalian intern	38
Gambar 18.	Rapat evaluasi atas maturitas sistem perngendalian intern pemerintah	39
Gambar 19.	Pengarahan dan Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja tahun 2024	42

Gambar 20. Monitoring dan Evaluasi Disiplin dan Kinerja Pegawai Triwulan III	42
Gambar 21. Rapat Pemutakhiran Data Mandiri pada aplikasi MyASN	42
Gambar 22. Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan pengawas dan pejabat fungsional lingkup Ditjen PDSPKP	43
Gambar 23. Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Indikasi Geografis Hasil Kelautan dan Perikanan pada tanggal 23 Oktober 2025.....	45
Gambar 24. Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah Sektor KP	46
Gambar 25. Pemusnahan Arsip lingkup Direktorat Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan.....	48
Gambar 26. Penataan Arsip Inaktif	48
Gambar 27. Rapat pemutakhiran SIRUP	50
Gambar 28. Rapat Penyusunan Klasifikasi UPT Ditjen PDSPKP	52
Gambar 29. Rapat Monev SOP lingkup Ditjen PDSPKP.....	52
Gambar 30. Aspek dan bobot penilaian Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik pada tahun 2025	54
Gambar 31. Rapat Penilaian Proposal KIPP Tahun 2025	55
Gambar 32. Finalisasi Pengisian Sinovik KIPP Ditjen PDSPKP	55
Gambar 33. Validasi Nasional Satudata Bidang PDSPKP Tahun 2025.....	58

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Perjanjian Kinerja Setditjen PDSPKP Tahun 2025	76
--	----

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sekretariat Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan pelaksanaan administrasi kepada seluruh unit organisasi pada Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan. Dalam menjalankan tugas tersebut, Sekretariat Ditjen PDSPKP tidak hanya berfungsi sebagai penopang administratif, tetapi juga berperan strategis dalam memastikan keterpaduan pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal. Salah satunya mendukung kebijakan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan diarahkan untuk mewujudkan produk kelautan dan perikanan yang memiliki daya saing tinggi sehingga dapat bersaing baik di pasar domestik maupun internasional. Kebijakan dimaksud mengacu pada pendekatan *market driven* di mana kebutuhan dan preferensi pasar menjadi dasar dalam perumusan kebijakan. Dengan demikian, produk yang dihasilkan harus memenuhi standar yang dibutuhkan pasar, sehingga lebih mudah diterima dan diminati oleh konsumen. Untuk menjawab tantangan tersebut, produk kelautan dan perikanan dituntut memiliki karakteristik unggul, yakni berkualitas tinggi (*high quality*), aman untuk dikonsumsi (*safe*), dapat ditelusuri asal-usulnya (*traceable*), memiliki nilai tambah yang tinggi (*high value content*), serta kompetitif di pasar (*competitive*). Pelaksanaan kebijakan ini dirancang secara berkelanjutan, baik dalam jangka pendek maupun jangka menengah dan panjang, guna memastikan konsistensi dan efektivitas dalam pencapaian tujuan strategis sektor kelautan dan perikanan.

Sejalan dengan itu, Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Ditjen PDSPKP Tahun 2025–2029 merupakan dokumen perencanaan strategis Ditjen PDSPKP yang menjadi acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan dalam kurun waktu lima tahunan. Mengacu pada dokumen Renstra tersebut, setiap unit kerja lingkup Ditjen PDSPKP membuat perencanaan tahunan guna mencapai indikator sasaran yang telah ditetapkan sesuai dengan program yang termuat dalam Renstra. Perencanaan tersebut dibuat

dengan disertai indikator sasaran dan cara mencapai sasaran tersebut secara strategis.

Dengan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Ditjen PDSPKP sebagai Entitas Akuntabilitas Kinerja berkewajiban menyusun dokumen perencanaan kinerja, pengukuran capaian kinerja, pengelolaan data capaian kinerja, serta menyampaikan Laporan Kinerja yang merupakan wujud akuntabilitas dari mandat yang diemban.

Dokumen Laporan Kinerja Sekretariat Ditjen PDSPKP merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban Instansi Pemerintah dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan baik berdasarkan renstra maupun rencana kinerja tahunan yang dibuat sebelumnya. Dokumen ini menjadi sarana untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja berdasarkan indikator sasaran yang telah ditetapkan. Laporan Kinerja ini akan menginformasikan capaian kinerja tahun 2025 atas pelaksanaan sasaran program dan indikator kinerja utama yang telah ditetapkan.

B. Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Tahun 2025 disusun dengan tujuan untuk menyajikan informasi kinerja yang terukur atas pelaksanaan tugas dan fungsi kepada pihak pemberi mandat. Melalui laporan ini, dirumuskan kesimpulan serta rekomendasi kebijakan yang dapat digunakan sebagai bahan masukan dan referensi dalam perumusan kebijakan pembangunan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan pada periode selanjutnya, dalam rangka meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas kinerja organisasi.

C. Tugas dan Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, kedudukan Ditjen PDSPKP berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Kelautan dan Perikanan. Dalam kedudukannya, Ditjen PDSPKP mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penguatan daya saing dan sistem logistik produk kelautan dan perikanan, serta peningkatan keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut diatas, Sekretariat Ditjen PDSPKP menyelenggarakan fungsi:

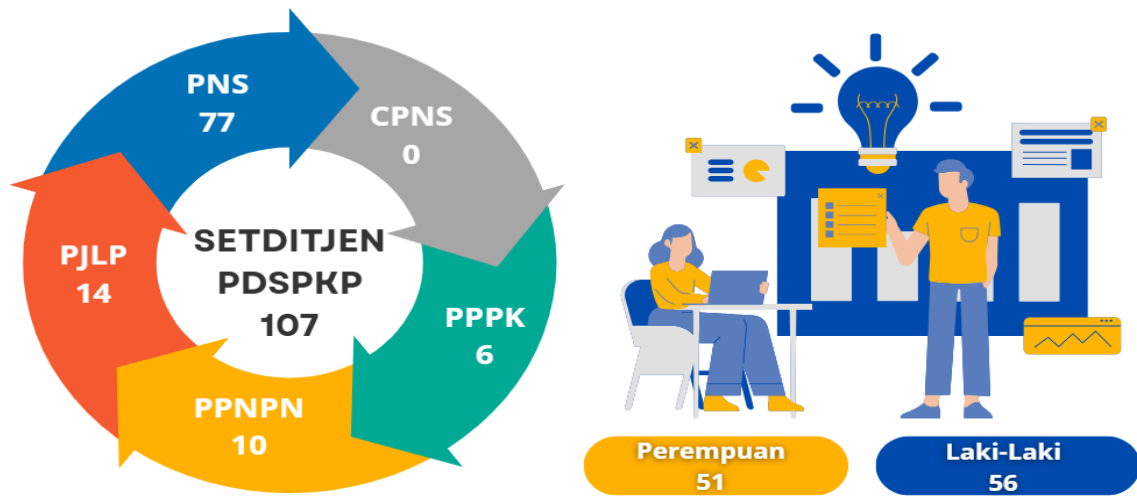
1. Koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan kinerja organisasi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan rencana, program, dan anggaran pada Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan;
2. Koordinasi pengelolaan keuangan dan barang milik/kekayaan negara pada Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan;
3. koordinasi pengelolaan sumber daya manusia aparatur, organisasi, dan tata laksana pada Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan;
4. Koordinasi penyusunan produk hukum, pelaksanaan advokasi hukum, dan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum pada Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan;
5. Koordinasi pengelolaan hubungan masyarakat dan layanan informasi publik pada Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan;
6. Koordinasi pengelolaan kerja sama pada Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan;
7. Koordinasi pengelolaan persuratan dan kearsipan serta rumah tangga dan perlengkapan pada Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan;

8. Koordinasi pengelolaan data dan informasi pada Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan;
9. Koordinasi pelaksanaan reformasi birokrasi pada Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan; dan
10. Pelaksanaan urusan administrasi Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Kelautan Dan Perikanan, serta Nota Dinas Sekretariat Ditjen PDSPKP Nomor 3635/DJPDSKP.1/RSDM.210/IX/2025 tanggal 25 September 2025 perihal Penyampaian Surat Tugas Ketua Tim Kerja lingkup Ditjen PDSPKP, adapun Tim Kerja lingkup Setditjen PDSPKP sebagai berikut:

1. Tim Kerja Program;
2. Tim Kerja Sumber Daya Manusia Aparatur;
3. Tim Kerja Organisasi, Tata Laksana dan Reformasi Birokrasi;
4. Tim Kerja Hukum;
5. Tim Kerja Kerjasama dan Hubungan Masyarakat;
6. Tim Kerja Data dan Layanan Publik;
7. Tim Kerja Keuangan;
8. Tim Kerja Pengendalian Risiko dan Pengadaan Barang/Jasa;
9. Kepala Bagian Umum.

D. Sumber Daya Manusia



Gambar 1. Jumlah Pegawai Setditjen PDSPKP Tahun 2025

E. Sistematika Penyajian LKj

Laporan kinerja Sekretariat Ditjen PDSPKP mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.



Gambar 2 Sistematika Penyajian Laporan Kinerja Tahun 2025

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Rancangan Rencana Strategis Tahun 2025-2029

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 ditujukan untuk mendukung Visi Indonesia Emas 2045 dan Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden tahun 2025-2029. Pada rancangan RPJMN, Visi Indonesia Emas 2045 dibagi dalam beberapa tahapan yang dilakukan secara terukur dan konsisten. Tahap pertama (tahun 2025- 2029), difokuskan pada penguatan fondasi transformasi. Tahap kedua (tahun 2030-2034), melakukan akselerasi untuk mewujudkan transformasi yang sudah diperkuat fondasinya. Selanjutnya pada tahap ketiga (tahun 2035-2039), Indonesia memulai langkah untuk melakukan ekspansi global. Kemudian pada tahap terakhir RPJMN (tahun 2040-2045), Indonesia diharapkan dapat mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045 yaitu “Indonesia sebagai Negara Nusantara Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan”.

Untuk tahap penguatan fondasi transformasi tahun 2025-2029, Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam rancangan rencana strategis tahun 2025-2029 menetapkan visi: “Terwujudnya Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan Sebagai Penggerak Pertumbuhan Ekonomi Nasional dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan untuk Mewujudkan Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”.

Sebagai bagian dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang berperan dalam mendukung arah kebijakan nasional, Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan berkomitmen untuk mewujudkan Visi Presiden dan Wakil Presiden serta Visi KKP. Pada tahap penguatan transformasi tahun 2025-2029, Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan mendukung dua dari lima agenda transformasi yang didukung KKP, yaitu: (a) transformasi ekonomi, dan (b) ketahanan sosial budaya dan ekologi

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perjanjian Kinerja berisi tentang pernyataan komitmen pimpinan yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Penetapan Kinerja digunakan sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.

Perjanjian kinerja Sekretariat Ditjen PDSPKP pada tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 1 di bawah ini.

Tabel 1. Perjanjian Kinerja Sekretariat Ditjen PDSPKP Tahun 2025

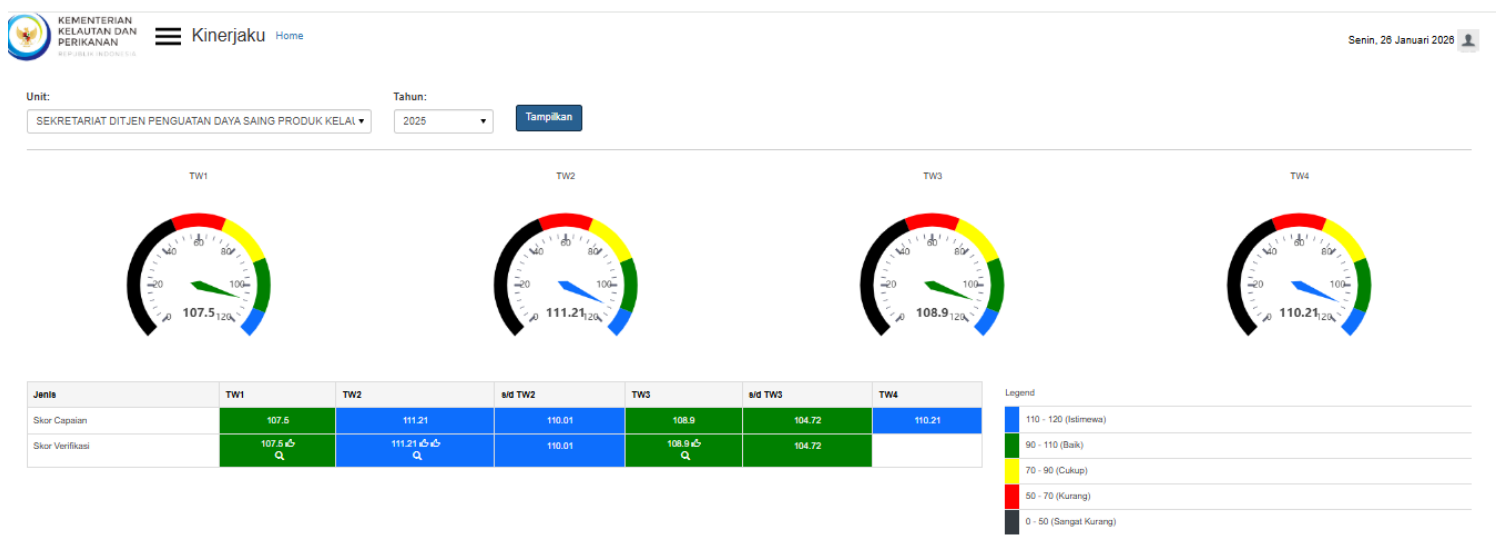
SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET
1.	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel dalam Bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan	1.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Persen)	85
		2.	Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LK Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Persen)	≤0,5
		3.	Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Program Prioritas/Strategis Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Persen)	81
		4.	Nilai Pembangunan Integritas Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Nilai)	76
		5.	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Nilai)	86
		6.	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Nilai)	92
		7.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Nilai)	81,5
		8.	Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Nilai)	3,5
		9.	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Indeks)	81
		10.	Persentase penyelesaian program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (Persen)	100

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET
		11.	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Nilai)	80
		12.	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Persen)	76
		13.	Persentase Penyelesaian Proses Bisnis Level 2 dan 3 serta SOP Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Persen)	65
		14.	Nilai Proposal Inovasi Pelayanan Publik Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Nilai)	77
		15.	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Persen)	90
		16.	Pemenuhan Layanan Perkantoran Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Layanan)	12
		17.	Persentase Penyelesaian Permasalahan Hukum Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Persen)	100
		18.	Persentase Dokumen Kerja sama yang disusun/ditindaklanjuti oleh Ditjen PDSPKP (Persen)	80
		19.	Rasio Jumlah Pemberitaan Negatif Bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan terhadap Total Pemberitaan Bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (Persen)	≤5

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja

Pada tahun 2025, Sekretariat Ditjen PDSPKP telah menetapkan 1 (satu) Sasaran Kegiatan dan 19 (sembilan belas) Indikator Kinerja Kegiatan. 3 (tiga) indikator kinerja kegiatan bersifat triwulanan, 2 (dua) bersifat semesteran, dan 14 (empat belas) bersifat tahunan. Berdasarkan hasil pengukuran Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Setditjen PDSPKP pada Tahun 2025 sebesar 110,21%(Istimewa). NKO tersebut merupakan gambaran nilai kinerja suatu organisasi secara terukur keseluruhan yang bisa diperoleh dari Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja (SAPK). Dashboard NKO pada SAPK Unit Kerja Sekretariat Ditjen PDSPKP Tahun 2025 sebagaimana Gambar 3.



Gambar 3. Dashboard NKO pada SAPK Unit Kerja Sekretariat Ditjen PDSPKP Tahun 2025

Pengukuran capaian kinerja Sekretariat Ditjen PDSPKP Tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi indikator kinerja sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Sekretariat Ditjen PDSPKP Tahun 2025

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan		Target		Realisasi TW IV 2025	% Terhadap Target TW IV	% Terhadap Target 2025
				Tahun 2025	TW IV 2025			
1.	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel dalam Bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan	1.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Persen)	85	85	98,68	116,09	116,09
		2.	Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LK Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Persen)	≤0,5	≤0,5	0,36	120	120
		3.	Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Program Prioritas/Strategis Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Persen)	81	81	92,44	114,12	114,12
		4.	Nilai Pembangunan Integritas Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Nilai)	76	76	86,51	113,83	113,83
		5.	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Nilai)	86	86	88,16	102,51	102,51
		6.	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Nilai)	92	92	97,3	105,76	105,76
		7.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Nilai)	81,5	81,5	88,53	108,63	108,63

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan		Target		Realisasi TW IV 2025	% Terhadap Target TW IV	% Terhadap Target 2025
				Tahun 2025	TW IV 2025			
		8.	Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Nilai)	3,5	3,5	3,68	105,14	105,14
		9.	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Indeks)	81	81	87,13	107,57	107,57
		10.	Persentase penyelesaian program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (Persen)	100	100	100	100	100
		11.	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Nilai)	80	80	99,4	120	124,25
		12.	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Persen)	76	76	100	131,58	131,58
		13.	Persentase Penyelesaian Proses Bisnis Level 2 dan 3 serta SOP Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Persen)	65	65	65	100	100
		14.	Nilai Proposal Inovasi Pelayanan Publik Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Nilai)	77	77	88,17	114,51	114,51
		15.	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Persen)	91	91	100	109,89	109,89

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan		Target		Realisasi TW IV 2025	% Terhadap Target TW IV	% Terhadap Target 2025
				Tahun 2025	TW IV 2025			
		16.	Pemenuhan Layanan Perkantoran Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Layanan)	12	12	12	100	100
		17.	Persentase Penyelesaian Permasalahan Hukum Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Persen)	100	100	100	100	100
		18.	Persentase Dokumen Kerja sama yang disusun/ditindaklanjuti oleh Ditjen PDSPKP (Persen)	80	80	89,49	111,86	111,86
		19.	Rasio Jumlah Pemberitaan Negatif Bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan terhadap Total Pemberitaan Bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (Persen)	≤5	≤5	0	120	120

B. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Evaluasi dan analisis capaian kinerja menjelaskan realisasi indikator kinerja, permasalahan dan kendala yang dihadapi serta upaya perbaikan yang dilakukan ke depan dalam rangka peningkatan kualitas pengelolaan kinerja di lingkungan Sekretariat Ditjen PDSPKP. Analisis untuk setiap sasaran kegiatan dan indikator kinerja kegiatan dijelaskan sebagai berikut:

Sasaran Kegiatan 1. Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel dalam Bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan

1. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Persen)

Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja di lingkungan Setditjen PDSPKP didefinisikan sebagai jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal berdasarkan LHP (terbatas pada LHP Audit, Reviu, Evaluasi dan Pemantauan) yang terbit pada LHP-nya pada periode 1 Oktober 2024 s.d 30 September 2025 (Triwulan IV Tahun 2024 s.d. Triwulan III Tahun 2025) dan telah ditindaklanjuti secara tuntas oleh unit eselon II sampai dengan 31 Desember Tahun 2025 (Triwulan IV Tahun 2025).

Tabel 3. Ikhtisar Pencapaian Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Ditjen PDSPKP

Indikator Kinerja (1)	Tahun (2)	Target (3)	Realisasi (4)	Persentase Realisasi Terhadap Target (5)	Target RPJMN (6)	Realisasi S.d 2025 (7)	Persentase Realisasi S.d 2025 terhadap Target RPJMN (8)
Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Ditjen PDSPKP	2025	85	98,68	116,09	89	96,68	110,88
	2024	80	97,41	121,76			

Capaian Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Ditjen PDSPKP pada Tahun 2025 adalah sebesar 98,68%. Capaian tersebut setara dengan 116,09% terhadap target Tahun 2025 yaitu sebesar 85. Capaian tahun 2025 setara dengan 110,88% terhadap target RPJMN 2025-2029 sebesar 89. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2024 sebesar 97,41, maka capaian tahun 2025 mengalami pertumbuhan sebesar 1,3%.

Capaian tahun 2025 juga masih lebih tinggi jika dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar 97,41. Tahun 2025 merupakan tahun pertama pada periode Rencana Strategis (Renstra) 2025-2029 sehingga capaiannya belum

dapat dibandingkan dengan capaian tahun-tahun sebelumnya pada periode Renstra yang sama.

Dalam mendukung pencapaian target indikator kinerja Triwulan IV Tahun 2025 Sekretariat Ditjen PDSPKP telah mengadakan pembahasan guna menindak lanjuti atas laporan hasil pemeriksaan beserta dengan tindak lanjut yang sesuai dengan rekomendasi Inspektorat Jenderal. Hal ini bertujuan agar dokumen tersebut dapat diterima oleh tim Inspektorat Jenderal dan dinyatakan tuntas. Pelaksanaan kegiatan guna pencapaian target indikator kinerja antara lain:

- a. Melaksanakan rapat pembahasan monitoring progres pelaksanaan kegiatan prioritas sistem rantai dingin pada lokasi kampung nelayan merah putih pada tanggal 16 Desember 2025, pelaksanaan kegiatan di hadiri oleh Inspektorat Jenderal IV KKP, Perwakilan tim teknis pendukung PPK lingkup Ditjen PDSPKP para penyedia kegiatan sistem rantai dingin KNMP pada Ditjen PDSPKP. Berdasarkan hasil pembahasan dilakukan monitorin gprogres pelaksanaan kegiatan Sistem Rantai Dingin atas pekerjaan Kendaraan Berpendingin, Gudang Beku Portabel, Cool Box, Pabrik Es Slurry dan Pabrik Es Balok di masing – masing lokasi KNMP.
- b. Melaksanakan koordinasi tindak lanjut atas laporan hasil pemeriksaan inspektorat jenderal sampai dengan periode triwulan IV tahun 2025 lingkup Ditjen PDSPKP dengan Inspektorat Jenderal IV KKP. Berdasarkan hasil koordinasi telah dilakukan pembahasan capain IKU persentas jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja unit eselon II lingkup Ditjen PDSPKP pada triwulan IV sebesar 98,68% dari target sebesar 85% dengan tindak lanjut jumlah rekomendasi sebanyak 227 dan sebanyak 224 rekomendasi dengan status tuntas dengan sisa 3 rekomendasi dengan status belum tuntas atau 1,32%. Selanjutnya dokumen tindak lanjut hasil rekomendasi tersebut agar upload melalui aplikasi <https://sidak.kkp.go.id>.

Tabel 4. Data Rekapitulasi Capaian IKU Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Ditjen PDSPKP Triwulan IV Tahun 2025

No	Unit Kerja	Jumlah Rekom	Tindak Lanjut (Tuntas)	% Tuntas	Sisa Rekom	% Sisa Rekom
1	Setditjen PDSPKP	124	121	97,58%	3	2,42%
2	Direktorat Logistik	23	23	100%	0	0%
3	Direktorat Pemberdayaan Usaha	10	10	100%	0	0%
4	Direktorat Pengolahan	23	23	100%	0	0%
5	Direktorat Pemasaran	88	88	100%	0	0%
6	BBP3KP	13	13	100%	0	0%
TOTAL		227	224	98,68%	3	1,32%

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang telah ditindaklanjuti (tuntas) pada periode Triwulan IV Tahun 2025 lingkup Ditjen PDSPKP sebesar 98,68% (tuntas 224 dari 227 rekomendasi).

Dalam rangka pencapaian indikator kinerja ini, Sekretariat Ditjen PDSPKP telah merealisasikan anggaran sebesar Rp77.307.560 sampai dengan Desember 2025 atau setara dengan 99,93% dari pagu anggaran sebesar Rp77.360.000, dengan efisiensi anggaran sebesar Rp52.440.

2. Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LK Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Persen)

Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK-RI atas Laporan Keuangan (LK) Lingkup Ditjen PDSPKP merupakan jumlah nilai temuan keuangan terbatas pada nilai tuntutan ganti rugi Unit Eselon I atas hasil pemeriksaan BPK terhadap Laporan Keuangan Ditjen PDSPKP Tahun 2024 dibandingkan dengan realisasi anggaran Ditjen PDSPKP tahun 2024.

Tabel 5. Ikhtisar Pencapaian Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LK Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP

Indikator Kinerja (1)	Tahun (2)	Target (3)	Realisasi (4)	Persentase Realisasi Terhadap Target (5)	Target RPJMN (6)	Realisasi S.d 2025 (7)	Persentase Realisasi S.d 2025 terhadap Target RPJMN (8)
Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK-RI atas Laporan Keuangan (LK) Lingkup Ditjen PDSPKP (%)	2025	<0,50	0,36	120	<0,50	0,36	120
	2024	<0,50	0,29	120			

Capaian indikator kinerja Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LK Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP tahun 2025 sebesar 0,36. Capaian tersebut setara dengan 120% baik terhadap target tahun 2025 maupun target RPJMN 2025-2029 sebesar <0,5%. Tahun 2025 merupakan tahun pertama pada periode Rencana Strategis (Renstra) 2025-2029 sehingga capaiannya belum dapat dibandingkan dengan capaian tahun-tahun sebelumnya pada periode Renstra yang sama.

Capaian Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas Laporan Keuangan Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP Tahun 2024 adalah 0,357% yang diperoleh dari temuan senilai Rp1.160.724.332,00 dibandingkan dengan realisasi senilai Rp324.896.904.773,00.

Sekretariat Ditjen PDSPKP telah melakukan beberapa kegiatan guna mendukung pencapaian target indikator kinerja ini antara lain :

- Melaksanakan kegiatan verifikasi kelengkapan dokumen pertanggungjawaban;
- Kegiatan rekonsiliasi dan penyusunan Laporan Keuangan dan BMN periode Juli sd September Tahun 2025 Lingkup Ditjen PDSPKP diselenggarakan pada tanggal 13 - 15 Oktober 2025. *Output* kegiatan ini yaitu rekonsiliasi transaksi *to do list* dan pendetilan transaksi serta tutup periode pada aplikasi sakti dan monsakti;

- c. Melakukan pemenuhan dokumen pemeriksaan oleh tim BPK RI perihal Pemeriksaan atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Dalam rangka pencapaian indikator kinerja ini, Sekretariat Ditjen PDSPKP telah merealisasikan anggaran sebesar Rp195.518.903 sampai dengan Desember 2025 atau setara dengan 99,77% dari pagu anggaran sebesar Rp195.965.000, dengan efisiensi anggaran sebesar Rp446.097.

3. Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Program Prioritas/Strategis Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Persen)

Tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis merupakan ukuran atas kesesuaian antara rencana (kebutuhan) dan realisasi kegiatan prioritas/strategis dalam bentuk bantuan dari KKP kepada masyarakat kelautan dan perikanan dan/atau kegiatan yang bersifat strategis berdasarkan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan.

Kegiatan yang dikategorikan prioritas/strategis antara lain memenuhi kriteria berikut :

- a. Memiliki dampak langsung kepada masyarakat;
- b. Memiliki anggaran besar;
- c. Mendukung secara langsung pencapaian target kinerja KKP;
- d. Mendukung pencapaian prioritas nasional;
- e. Merupakan arahan direktif presiden;
- f. Pertimbangan lainnya yang relevan.

Tabel 6. Ikhtisar Pencapaian Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Program Prioritas/Strategis Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP

Indikator Kinerja (1)	Tahun (2)	Target (3)	Realisasi (4)	Persentase Realisasi Terhadap Target (5)	Target RPJMN (6)	Realisasi S.d 2025 (7)	Persentase Realisasi S.d 2025 terhadap Target RPJMN (8)
Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/Strategis Ditjen PDSPKP (%)	2025	81	92,44	114,12	85	92,44	108,75
	2024	80,00	92,44	115,55			

Indikator Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Program Prioritas/Strategis Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP tahun 2025 ditargetkan sebesar 81%. Berdasarkan Nota Dinas Sekretaris Inspektorat Jenderal KKP Nomor 952/ITJ.0/RC.610/X/2025 perihal Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Mandatory Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Program Prioritas/Strategis lingkup KKP, disebutkan bahwa sehubungan dengan keterbatasan anggaran pada DIPA Inspektorat Jenderal Tahun 2025 akibat kebijakan efisiensi (blokir anggaran), kegiatan pengukuran capaian indikator dimaksud tidak dapat dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal sebagaimana tahun-tahun sebelumnya. Dalam hal pelaksanaan pengukuran mandiri oleh masing-masing Eselon I belum memungkinkan untuk dilaksanakan, Unit Kerja Eselon I dapat menggunakan angka capaian tahun 2024 sebagai dasar pengisian capaian indikator pada Laporan Kinerja Tahun 2025.

Sesuai dengan Nota Dinas di atas, maka Capaian Indikator tingkat Efektivitas Pelaksanaan Program Prioritas/Strategis tahun 2025 sebesar 92,44 atau setara 114,12% terhadap target tahun 2025 sebesar 81. Tahun 2025 sebesar 92,44. Tahun 2025 merupakan tahun pertama pada periode Rencana Strategis (Renstra) 2025-2029 sehingga capaiannya belum dapat dibandingkan dengan capaian tahun-tahun sebelumnya pada periode Renstra yang sama.

Sekretariat Ditjen PDSPKP telah melakukan beberapa kegiatan guna mendukung pencapaian target indikator kinerja ini antara lain:

1. Rapat Monitoring Dan Evaluasi Pelaporan Penyaluran Bantuan Pemerintah Pada Aplikasi Satu Data Bantuan Pemerintah Lingkup Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan Dan Perikanan dilaksanakan tanggal 10 Desember 2025.

Rapat monitoring dan evaluasi pelaporan penyaluran bantuan pemerintah Tahun 2024 dan 2025 pada Aplikasi Satu Data Bantuan Pemerintah dilaksanakan pada 10 Desember 2025 di lingkungan Ditjen PDSPKP dengan melibatkan perwakilan unit kerja terkait. Rapat membahas perkembangan pengisian data, permasalahan teknis dan administratif

dalam proses input, serta kendala umum yang mempengaruhi kelengkapan dan ketepatan waktu pelaporan. Hasil rapat menunjukkan masih terdapat keterbatasan sistem aplikasi yang menghambat input data, sehingga diperlukan koordinasi lanjutan dengan Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) sebagai tindak lanjut untuk penyempurnaan sistem dan peningkatan kualitas pelaporan ke depan.



Gambar 4. Rapat monitoring dan evaluasi pelaporan penyaluran bantuan pemerintah Tahun 2024 dan 2025

2. Rapat Koordinasi Penyelesaian Permasalahan Pengisian Pada Aplikasi Satu Data Bantuan Pemerintah Lingkup Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan Dan Perikanan dilaksanakan tanggal 12 Desember 2025.

Rapat koordinasi ini dilaksanakan sebagai tindak lanjut rapat monitoring sebelumnya untuk membahas lebih lanjut permasalahan pengisian data bantuan pemerintah pada Aplikasi Satu Data Bantuan Pemerintah. Dalam rapat, dilakukan pendalaman terhadap kendala teknis dan administratif yang dihadapi unit kerja, serta klarifikasi mekanisme dan kelengkapan data yang harus diinput.

Hasil rapat menyepakati bahwa sebagian kendala berasal dari keterbatasan sistem aplikasi, sehingga permasalahan tersebut akan dikompilasi dan dikoordinasikan dengan Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) untuk perbaikan lebih lanjut. Selain itu, unit kerja diminta segera melengkapi dan menyesuaikan data bantuan pemerintah Tahun 2024 dan 2025 sesuai hasil pembahasan.



Gambar 5. Rapat Koordinasi Penyelesaian Permasalahan Pengisian Pada Aplikasi Satu Data Bantuan Pemerintah

Dalam rangka pencapaian indikator kinerja ini, Sekretariat Ditjen PDSPKP telah merealisasikan anggaran sebesar Rp22.665.200 sampai dengan Desember 2025 atau setara dengan 100% dari pagu anggaran sebesar Rp22.666.000, dengan efisiensi anggaran sebesar Rp800.

4. Nilai Pembangunan Integritas Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Nilai)

Penilaian yang dilakukan untuk mengukur tingkat komitmen dari implementasi pembangunan integritas di lingkungan Unit Eselon I di KKP dengan fokus pada pembangunan Sistem Anti Korupsi yang mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 49 Tahun 2021 tentang Pembangunan Integritas di Lingkungan KKP.

Tabel 7. Ikhtisar Pencapaian Nilai Pembangunan Integritas Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP

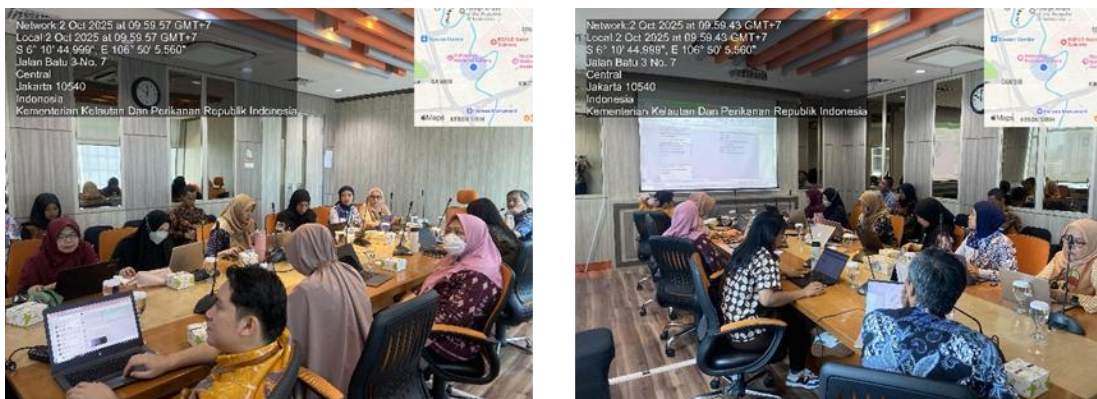
Indikator Kinerja (1)	Tahun (2)	Target (3)	Realisasi (4)	Persentase Realisasi Terhadap Target (5)	Target RPJMN (6)	Realisasi S.d 2024 (7)	Persentase Realisasi S.d 2024 terhadap Target RPJMN (8)
Nilai Pembangunan Integritas Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP	2025	76	86,51	113,83%	80,00	86,51	108,14

Capaian indikator Nilai Pembangunan Integritas Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP sebesar 86,51 atau setara 113,83% dari target 2025 sebesar 76. Capaian tersebut setara dengan 108,14% jika dibandingkan dengan target RPJMN 2025-2029 yaitu sebesar 80. Indikator ini merupakan indikator kinerja baru sehingga tidak dapat dibandingkan dengan capaian pada tahun sebelumnya. Tahun 2025 merupakan tahun pertama pada periode Rencana Strategis (Renstra) 2025-2029 sehingga capaiannya belum dapat dibandingkan dengan capaian tahun-tahun sebelumnya pada periode Renstra yang sama.

Sekretariat Ditjen PDSPKP telah melaksanakan beberapa kegiatan dalam rangka pencapaian indikator kinerja ini antara lain:

- a. Pelaksanaan Apel Pagi dan Briefing Reformasi Birokrasi setiap hari Senin yang dilaksanakan oleh seluruh unit kerja eselon II lingkup Ditjen PDSPKP;
- b. Penanganan Pengaduan lingkup Ditjen PDSPKP Bulan Oktober, November, dan Desember 2025 dan konsultasi/pengaduan yang diterima selain melalui SP4N LAPOR! telah seluruhnya diinput pada aplikasi SP4N LAPOR! dengan status tuntas. Laporan penanganan pengaduan juga telah disampaikan kepada Inspektorat V selaku Tim Penanganan Pengaduan Kementerian secara berjenjang;
- c. Rapat penyusunan Rencana Aksi RB Tematik KKP dengan seluruh unit kerja eselon II lingkup Ditjen PDSPKP pada hari Kamis, tanggal 2 Oktober 2025;
- d. Evaluasi Capaian Reformasi Birokrasi Triwulan III Tahun 2025 lingkup Ditjen PDSPKP pada 25 November – 5 Desember 2025;
- e. Rapat *Entry Meeting* Pemantauan Nilai Pembangunan Integritas di Lingkungan KKP Tahun 2025 oleh Inspektorat Jenderal KKP pada hari Selasa, tanggal 11 November 2025;
- f. Rapat koordinasi penilaian Pembangunan Integritas oleh Inspektorat IV mengundang seluruh unit kerja eselon II lingkup Ditjen PDSPKP pada hari Senin, tanggal 17 November 2025;

- g. *Sharing session* dengan materi Kebijakan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Ditjen PDSPKP pada kegiatan Bimbingan Teknis dengan tema "Membangun Budaya Pelayanan Prima melalui Penerapan Komunikasi Efektif dan Sistem Penanganan Pengaduan yang responsif". Kegiatan dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 18 November 2025;
- h. Rapat koordinasi penyusunan Finalisasi Rencana Aksi RB Tematik KKP bersama Biro SDM Aparatur dan Organisasi serta seluruh unit kerja eselon II lingkup Ditjen PDSPKP pada hari Kamis, tanggal 27 November 2025;
- i. Rapat koordinasi penilaian Pembangunan Integritas tahun 2025 di Ditjen PDSPKP dengan Inspektorat IV pada hari Rabu, tanggal 3 Desember 2025;
- j. Partisipasi Ditjen PDSPKP pada Rangkaian Kegiatan Peringatan HAKORDIA 9 Desember Tahun 2025 lingkup Ditjen PDSPKP. Partisipasi tersebut meliputi pemasangan *twibbon* nilai antikorupsi, penayangan konten edukasi antikorupsi di media sosial Ditjen PDSPKP, melaksanakan kampanye antikorupsi melalui penampilan musik dan kuis bertema antikorupsi pada kegiatan bazar KKP tanggal 4-5 Desember 2025. Rangkaian kegiatan juga dimeriahkan dengan jalan sehat "PDS Goes To Monas" pada tanggal 5 Desember 2025;
- k. Rapat monev Pengelolaan Konflik Kepentingan dan Gratifikasi Semester II Tahun 2025 di lingkungan Ditjen PDSPKP pada hari Jumat, tanggal 19 Desember 2025.



Gambar 6. Penyusunan Rencana Aksi RB Tematik lingkup Ditjen PDSPKP



Gambar 7. Monev Pengelolaan Konflik Kepentingan dan Gratifikasi Semester II Tahun 2025 di Lingkungan Ditjen PDSPKP



Gambar 8. Partisipasi Ditjen PDSPKP pada Rangkaian Kegiatan Peringatan HAKORDIA Tahun 2025

Dalam rangka pencapaian indikator kinerja ini, Sekretariat Ditjen PDSPKP telah merealisasikan anggaran sebesar Rp30.147.560 sampai dengan Desember 2025 atau setara dengan 99,83% dari pagu anggaran sebesar Rp30.200.000, dengan efisiensi anggaran sebesar Rp52.440.

5. Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Nilai)

SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Nilai PMSAKIP merupakan penilaian mandiri oleh Itjen KKP terhadap penerapan SAKIP pada instansi pemerintah yang sejalan dan konsisten dengan penerapan reformasi birokrasi, yang berorientasi pada penerapan *outcome* dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik.

Nilai PM SAKIP Lingkup Ditjen PDSPKP dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), dan evaluasi kinerja (25%). Nilai PM SAKIP Ditjen PDSPKP merupakan ukuran perkembangan implementasi SAKIP di Ditjen PDSPKP.

Tabel 8 Ikhtisar Pencapaian Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP.

Indikator Kinerja (1)	Tahun (2)	Target (3)	Realisasi (4)	Persentase Realisasi Terhadap Target (5)	Target RPJMN (6)	Realisasi S.d 2025 (7)	Persentase Realisasi S.d 2025 terhadap Target RPJMN (8)
Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Ditjen PDSPKP (Nilai)	2025	86	88,16	102,51	86,8	88,16	101,57
	2024	84,00	86,69	103,20			

Capaian Indikator Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP tahun 2025 sebesar 88,16 atau setara dengan 102,51% terhadap target tahun 2025 sebesar 86. Capaian tersebut setara 101,57% jika dibandingkan dengan target RPJMN 2025-2029 sebesar 86,8. Jika dibandingkan dengan realisasi capaian tahun 2024 sebesar 86,69, maka capaian tahun 2025 mengalami pertumbuhan sebesar 1,7%. Tahun 2025 merupakan tahun pertama pada periode Rencana Strategis (Renstra) 2025-2029 sehingga capaiannya belum dapat dibandingkan dengan capaian tahun-tahun sebelumnya pada periode Renstra yang sama.

Sekretariat Ditjen PDSPKP telah melakukan beberapa kegiatan guna mendukung pencapaian target indikator kinerja ini antara lain:

1. Rapat Dalam rangka Evaluasi Rencana Aksi Level 1 dan 2 periode triwulan III tahun 2025 dilaksanakan tanggal 2 Oktober 2025.

Kegiatan Evaluasi Rencana Aksi Level 1 dan 2 Triwulan III Tahun 2025 dilaksanakan pada 2 Oktober 2025 di Ruang Rapat Sekretariat Ditjen PDSPKP. Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan pengisian dan evaluasi capaian rencana aksi lingkup Ditjen PDSPKP dengan melibatkan perwakilan Biro Perencanaan KKP dan unit kerja eselon II.

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa seluruh direktorat telah melakukan pengisian capaian melalui tautan yang disediakan. Direktorat Pemasaran mencatat realisasi pada kegiatan ekspor rumput laut, kampanye Gemarikan, penyusunan profil pasar, kesepakatan pemasaran, dan kurasi produk, meskipun sebagian masih di bawah target tahunan.

2. Rapat Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi Lingkup Ditjen PDSPKP Periode Triwulan III Tahun Anggaran 2025 dilaksanakan tanggal 9 Oktober 2025.

Rapat Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi Lingkup Ditjen PDSPKP Triwulan III Tahun Anggaran 2025 dilaksanakan dalam rangka monitoring dan evaluasi pelaksanaan program serta pencapaian target kinerja unit kerja. Kegiatan ini juga membahas pemutakhiran data capaian kinerja dan realisasi anggaran serta langkah-langkah

penyesuaian target untuk memastikan ketercapaian sasaran organisasi sampai akhir tahun anggaran.

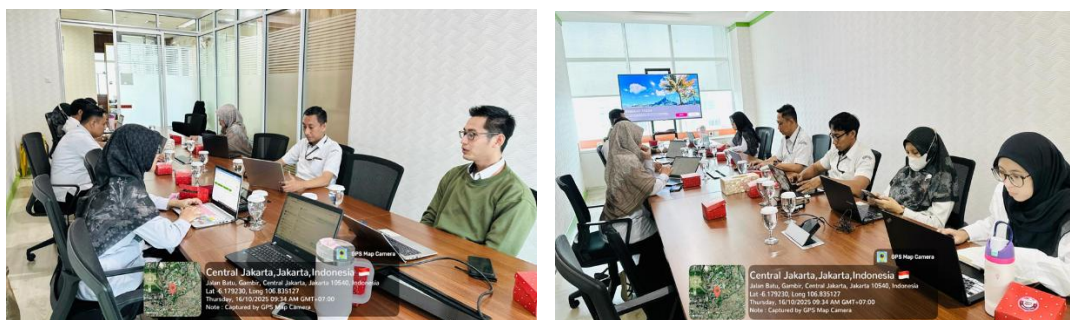
3. Rapat Dalam rangka Pelaporan Kinerja Organisasi Lingkup Ditjen PDSPKP, penyusunan Draft LKJ Level I dan II periode Triwulan III tahun 2025 dilaksanakan tanggal 13 oktober 2025.

Kegiatan Penyusunan Draft Laporan Kinerja (LKj) Triwulan III Tahun 2025 dilaksanakan untuk membahas penyusunan LKj Level I dan Level II serta verifikasi dan pemutakhiran data kinerja lingkup Ditjen PDSPKP. Rapat menekankan pentingnya kelengkapan narasi capaian, data dukung kinerja dan anggaran, serta penyesuaian target sesuai perubahan perjanjian kinerja. Selain itu, dibahas perkembangan capaian nilai ekspor perikanan, termasuk perhatian khusus pada komoditas rumput laut guna mendukung pencapaian target organisasi.



Gambar 9. Rapat Dalam rangka Pelaporan Kinerja Organisasi Lingkup Ditjen PDSPKP

4. Rapat Verifikasi Capaian Kinerja pada Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja(SAPK) Triwulan III tahun 2025 dilaksanakan tanggal 16 Oktober 2025.



Gambar 10. Rapat Verifikasi Capaian Kinerja pada Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja(SAPK) Triwulan III tahun 2025

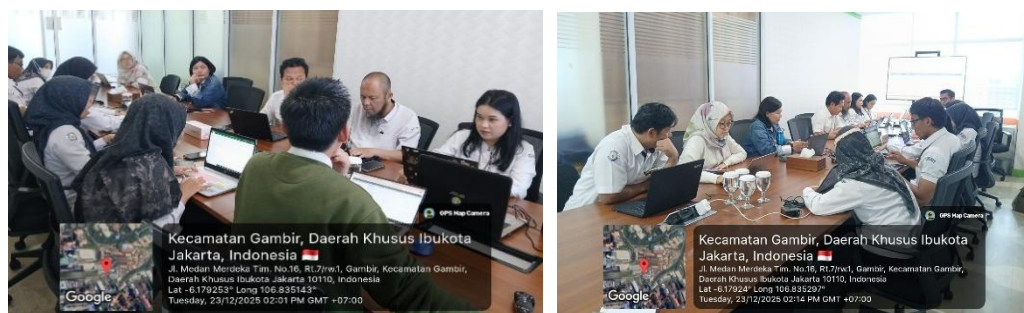
5. Rapat monitoring dan evaluasi pengelolaan kinerja sampai dengan triwulan III dan persiapan pelaporan triwulan IV tahun 2025 lingkup Ditjen

PDSPKP, Verifikasi kelengkapan dokumen pelaporan pada link SAKIP Ditjen PDSPKP dilaksanakan tanggal 19 Desember 2025.

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kinerja serta Persiapan Pelaporan Triwulan IV Tahun 2025 dilaksanakan untuk memastikan kelengkapan dan kesesuaian dokumen pelaporan kinerja lingkup Ditjen PDSPKP. Rapat membahas penyesuaian indikator dan rencana aksi, sinkronisasi anggaran, penguatan substansi pengarusutamaan gender, serta penyiapan data dukung kinerja, termasuk kegiatan yang ditagging PPKE dan capaian indikator level 1. Selain itu, dibahas tindak lanjut hasil reuiu SAKIP serta penginputan data pada aplikasi kinerja guna mendukung peningkatan kualitas pelaporan kinerja organisasi.

6. Rapat penyiapan bahan laporan tahunan lingkup Ditjen PDSPKP tahun 2025 dilaksanakan tanggal 23 Desember 2025.

Rapat Penyiapan Bahan Laporan Tahunan Ditjen PDSPKP Tahun 2025 dilaksanakan untuk menyepakati teknis penyusunan laporan yang sistematis dan informatif. Pembahasan difokuskan pada penyajian capaian kinerja utama, penonjolan kegiatan berdampak signifikan per rincian output, serta penguatan narasi pembiayaan, investasi, PNBP, manajemen risiko, dan kontribusi terhadap kebijakan Blue Economy. Laporan disusun mengacu pada Permen KP Nomor 40 Tahun 2022 dengan pendekatan visual dan narasi singkat yang menampilkan target, realisasi, serta manfaat kegiatan.



Gambar 11. Rapat penyiapan bahan laporan tahunan lingkup Ditjen PDSPKP tahun 2025

Dalam rangka pencapaian indikator kinerja ini, Sekretariat Ditjen PDSPKP telah merealisasikan anggaran sebesar Rp420.224.000 sampai dengan Desember 2025 atau setara dengan 99,99% dari pagu anggaran sebesar Rp420.147.389, dengan efisiensi anggaran sebesar Rp76.611.

6. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Nilai)

Indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga atas kualitas implementasi perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran dengan memperhatikan 8 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran. Indikator kinerja ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja K/L.

Tabel 9. Ikhtisar Pencapaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP

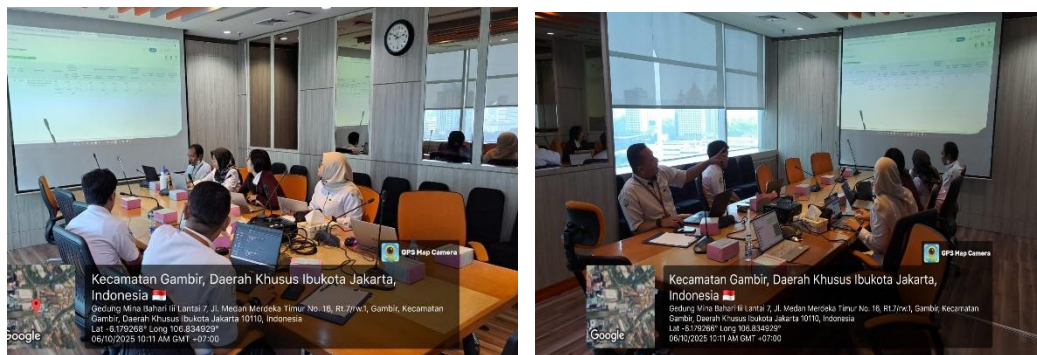
Indikator Kinerja (1)	Tahun (2)	Target (3)	Realisasi (4)	Persentase Realisasi Terhadap Target (5)	Target RPJMN (6)	Realisasi S.d 2025 (7)	Persentase Realisasi S.d 2024 terhadap Target RPJMN (8)
Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Ditjen PDSPKP (Nilai)	2025	92	97,30	105,76	92,25	97,30	105,47
	2024	93,76	91,86	97,97			

Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP tahun 2025 sebesar 97,30 atau setara dengan 105,76% terhadap target 2025 sebesar 92. Capaian tersebut setara dengan 105,47% jika dibandingkan dengan target RPJMN 2025-2029 sebesar 92,25. Capaian tahun 2025 mengalami pertumbuhan sebesar 5,9% jika dibandingkan dengan capaian tahun 2024. Tahun 2025 merupakan tahun pertama pada periode

Rencana Strategis (Renstra) 2025-2029 sehingga capaiannya belum dapat dibandingkan dengan capaian tahun-tahun sebelumnya pada periode Renstra yang sama.

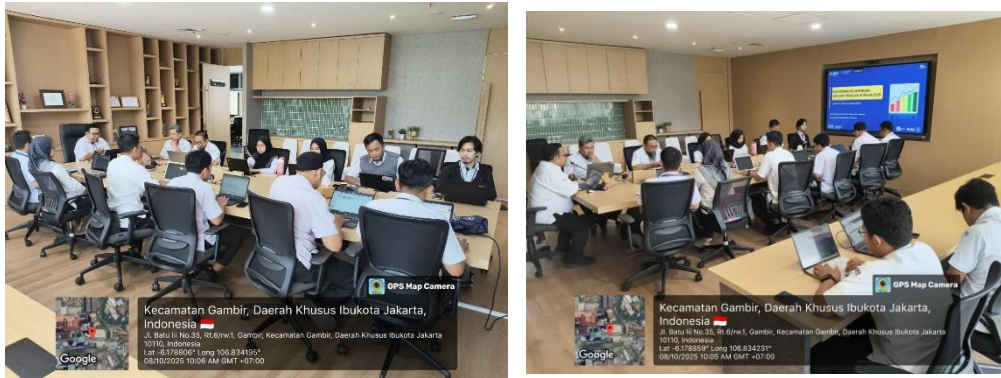
Dalam rangka optimalisasi capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Ditjen Jenderal PDSPKP pada tahun 2025, Sekretariat Ditjen PDSPKP telah melaksanakan kegiatan dan berkoordinasi dengan seluruh Satuan Kerja di Lingkungan Ditjen PDSPKP antara lain:

- a. Melaksanakan monitoring capaian IKPA terhadap progres pengisian Capaian Output periode Agustus 2025 dengan seluruh Unit Kerja dan Satker Tugas Pembantuan lingkup Ditjen PDSPKP pada tanggal 1 sampai dengan 10 setiap bulannya, kegiatan monitoring dilakukan secara daring dan diikuti oleh 34 Satker Tugas Pembantuan (TP).



Gambar 12. Monitoring Capaian IKPA pada Pengisian Capaian Output dan Rencana Penarikan Dana

- b. Pengisian proyeksi rencana penarikan dana yang dilaksanakan pada tanggal 6 Oktober 2025. Kegiatan dilaksanakan untuk mengevaluasi indikator Rencana Penarikan Dana Triwulan III dan pengisian proyeksi Rencana Penarikan Dana periode Triwulan IV
- c. Rapat monitoring pelaksanaan IKPA di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang dilaksanakan Biro Keuangan KKP pada tanggal 6 Oktober 2025.



Gambar 13. Rapat Monitoring Pelaksanaan IKPA KKP pada Indikator Halaman III DIPA Periode September Tahun 2025

Dalam rangka pencapaian indikator kinerja ini, Sekretariat Ditjen PDSPKP telah merealisasikan anggaran sebesar Rp522.581.306 sampai dengan Desember 2025 atau setara dengan 99,90% dari pagu anggaran sebesar Rp523.081.000, dengan efisiensi anggaran sebesar Rp499.694.

7. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Nilai)

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran adalah nilai yang dihasilkan atas kinerja perencanaan anggaran untuk tahun anggaran yang telah selesai untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan anggaran. Pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Negara/Lembaga atas perencanaan anggaran melalui aplikasi MONEV Kemenkeu. Berdasarkan KMK Nomor 466 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan serta Evaluasi Kinerja Anggaran Terhadap Perencanaan Anggaran. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran dinilai berdasarkan aspek Efektivitas dan Efisiensi yang dihitung dengan menjumlahkan hasil perkalian capaian setiap indikator dengan bobot pada masing-masing indikator.

Tabel 10. Ikhtisar Pencapaian Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP

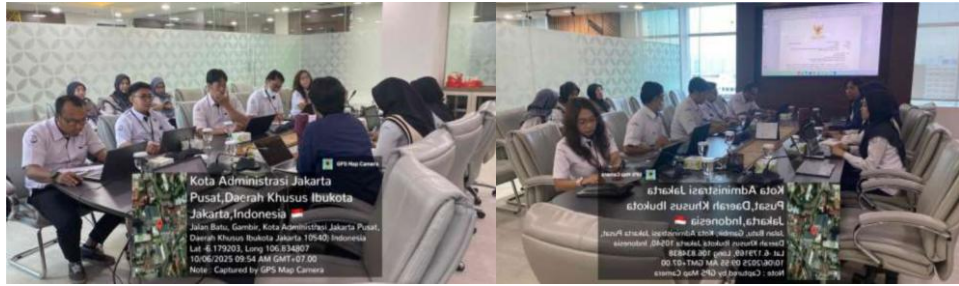
Indikator Kinerja (1)	Tahun (2)	Target (3)	Realisasi (4)	Persentase Realisasi Terhadap Target (5)	Target RPJMN (6)	Realisasi S.d 2025 (7)	Persentase Realisasi S.d 2025 terhadap Target RPJMN (8)
Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Ditjen PDSPKP (Nilai)	2025	81,5	88,53	108,63	82,5	88,53	107,31
	2024	81,00	82,38	101,70			

Capaian Indikator Kinerja Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP tahun 2025 sebesar 88,53, atau setara dengan 108,63% dari target 2025 sebesar 81,5. Capaian tersebut setara dengan 107,31 jika dibandingkan dengan target RPJMN 2025-2029 sebesar 82,5. Capaian tahun 2025 mengalami pertumbuhan sebesar 7,47 jika dibandingkan dengan realisasi capaian tahun 2024 sebesar 82,38. Tahun 2025 merupakan tahun pertama pada periode Rencana Strategis (Renstra) 2025-2029 sehingga capaiannya belum dapat dibandingkan dengan capaian tahun-tahun sebelumnya pada periode Renstra yang sama.

Beberapa kegiatan yang telah dilakukan pada periode Triwulan IV guna pencapaian indikator kinerja Nilai Kinerja Anggaran Sekretariat Ditjen PDSPKP antara lain:

1. Rapat Rencana Kerja Anggaran Tahun 2026 Pagu Alokasi Anggaran dilaksanakan tanggal 6 Oktober 2025.

Rapat dilaksanakan untuk membahas Rencana Kerja dan Anggaran Ditjen PDSPKP TA 2026 Pagu Alokasi Anggaran berdasarkan terbitnya Surat Menteri Keuangan Nomor S-626/MK.03/2025 tanggal 29 September 2025 perihal Penyampaian Alokasi Anggaran Kementerian/Lembaga dan Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2026.



Gambar 14. Rapat Rencana Kerja Anggaran Tahun 2026 Pagu Alokasi Anggaran

2. Rapat Pembahasan Reviu Rencana Kerja Anggaran Tahun 2026 Pagu Alokasi Anggaran, kegiatan dilaksanakan pada tanggal 8 Oktober 2025.

Rapat membahas struktur alokasi anggaran per jenis belanja dan program, serta mengidentifikasi sejumlah kegiatan yang masih memerlukan kelengkapan dokumen pendukung, penyesuaian standar kebutuhan barang, dan pemenuhan ketentuan perencanaan teknis. Selain itu, disepakati perlunya penyeragaman harga satuan ATK dan bahan komputer guna meningkatkan efisiensi dan konsistensi penganggaran.

3. Rapat Pembahasan Catatan Hasil Review (CHR) pagu alokasi anggaran Tahun 2026 lingkup Ditjen PDSPKP, kegiatan dilaksanakan pada tanggal 14 Oktober 2025

Rapat membahas pagu anggaran yang bersumber dari Rupiah Murni serta mengidentifikasi sejumlah kegiatan yang masih memerlukan kelengkapan dokumen pendukung, khususnya terkait survei harga, TOR/KAK, dan dokumen penawaran. Seluruh kekurangan dokumen tersebut telah ditindaklanjuti dan diunggah kembali sebagai bahan perbaikan perencanaan anggaran.

4. Rapat koordinasi perencanaan program dan anggaran lingkup Ditjen PDSPKP Tahun 2025 dalam rangka reviu usulan revisi anggaran kewenangan DJA, kegiatan dilaksanakan pada tanggal 22 Oktober 2025
5. Rapat reviu atas usulan revisi pergeseran anggaran dalam rangka pemenuhan kegiatan prioritas presiden lingkup KKP, kegiatan dilaksanakan pada tanggal 30 Oktober 2025.

Rapat membahas relaksasi efisiensi anggaran KKP untuk mendukung belanja pegawai, operasional, pelayanan publik, kegiatan prioritas nasional, serta peningkatan penerimaan negara. Selain itu, dilakukan penyesuaian pagu anggaran Ditjen PDSPKP dan pembukaan blokir anggaran pada beberapa kegiatan guna meningkatkan efektivitas, kualitas belanja, dan percepatan pencapaian kinerja sesuai ketentuan yang berlaku.

6. Rapat Pembahasan Dokumen Perencanaan Kinerja Level I dan Level II Tahun 2025 sesuai SOTK Baru, kegiatan dilaksanakan pada tanggal 19 November 2025
7. Rapat Pembahasan Finalisasi Draft Renstra DJPDSPKP 2025-2029, kegiatan dilaksanakan pada tanggal 26 November 2025.

Rapat dilaksanakan dalam rangka finalisasi Draft Rencana Strategis Ditjen PDSPKP Tahun 2025–2029 sebagai tindak lanjut penetapan Renstra KKP. Kegiatan membahas penyelarasan visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan, program, dan kegiatan sesuai tugas dan fungsi Ditjen PDSPKP, serta menghimpun masukan dari seluruh unit kerja untuk penyempurnaan dokumen sebelum ditetapkan.

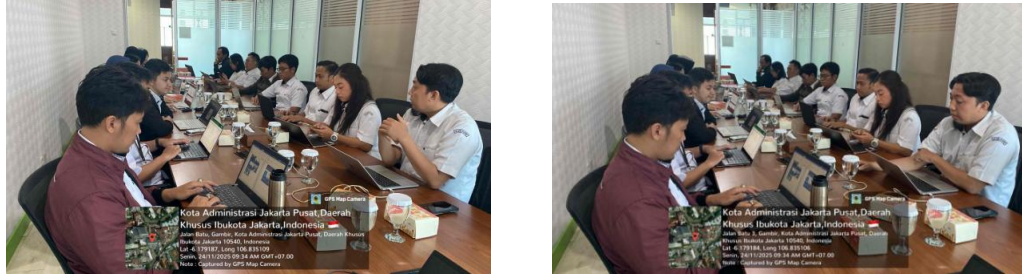
8. Rapat Pembahasan Persiapan Pelaksanaan dan Kebutuhan Anggaran Rehab Pasar Ikan Kota Sorong Provinsi Papua Barat Daya, kegiatan dilaksanakan pada tanggal 7 November 2025.

Rapat dilaksanakan dalam rangka persiapan pelaksanaan dan identifikasi kebutuhan anggaran rehabilitasi Pasar Ikan Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, sebagai tindak lanjut usulan DPR RI dan Pemerintah Daerah. Pembahasan difokuskan pada kondisi kerusakan sarana prasarana, kebutuhan anggaran, serta penyesuaian ruang lingkup pekerjaan dengan keterbatasan waktu pelaksanaan, sehingga disepakati rehabilitasi difokuskan pada perbaikan atap pasar, sementara perluasan pasar direncanakan pada tahun berikutnya.

9. Rapat Pembahasan usulan revisi kewenangan KPA, kegiatan dilaksanakan pada tanggal 24 November 2025.

Pembahasan mencakup penyesuaian rincian belanja dari seluruh unit kerja eselon II, meliputi pergeseran antar akun, penyesuaian

subkomponen kegiatan, serta efisiensi anggaran tanpa mengubah pagu total, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil pembahasan menjadi dasar tindak lanjut penyesuaian dokumen anggaran pada masing-masing unit kerja.



Gambar 15. Rapat Pembahasan usulan revisi kewenangan KPA

10. Rapat Pembahasan Koordinasi pelaksanaan program dan anggaran lingkup Ditjen PDSPKP Tahun 2026, kegiatan dilaksanakan pada tanggal 11 Desember 2025.

Rapat membahas persiapan pembukaan blokir anggaran Tahun 2026 serta penyusunan pedoman teknis Bantuan Pemerintah di lingkungan Ditjen PDSPKP. Fokus utama adalah memastikan kelengkapan dokumen pendukung agar proses administrasi dan pelaksanaan kegiatan dapat berjalan sesuai ketentuan.

Rapat juga menekankan pentingnya percepatan penyusunan juknis, pemenuhan persyaratan clearance, serta penyesuaian kebijakan efisiensi agar pengelolaan anggaran tahun 2026 dapat berjalan efektif dan tepat waktu.

11. Rapat penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Tahun 2025–2029, kegiatan dilaksanakan pada tanggal 22 Desember 2025.

Rapat membahas penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Ditjen PDSPKP Tahun 2025–2029 agar selaras dengan RPJMN dan Renstra KKP. Fokus utama adalah memastikan arah kebijakan Ditjen PDSPKP mendukung peningkatan daya saing produk kelautan dan perikanan, khususnya melalui peningkatan nilai ekspor, konsumsi ikan, serta penguatan produk bernilai tambah. Rapat juga menekankan pentingnya sinkronisasi indikator, target, dan metodologi kinerja, serta penguatan

strategi hilirisasi, diversifikasi pasar, dan peningkatan kualitas produk guna mendukung pencapaian sasaran pembangunan sektor kelautan dan perikanan secara berkelanjutan.



Gambar 16. Rapat membahas penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Ditjen PDSPKP Tahun 2025–2029

12. Rapat Pembahasan Rencana Buka Blokir Anggaran Tahun 2026, kegiatan dilaksanakan pada tanggal 4 Desember 2025.

Rapat membahas rencana usulan buka blokir anggaran Ditjen PDSPKP Tahun 2026 yang masih tertahan karena kelengkapan dokumen dan persyaratan administrasi. Fokus pembahasan meliputi identifikasi penyebab blokir, penyiapan data dukung yang diperlukan, serta penyusunan petunjuk teknis bantuan pemerintah dan kegiatan yang dikerjasamakan dengan mitra. Disepakati bahwa seluruh unit kerja segera melengkapi dokumen pendukung agar proses pengajuan buka blokir ke Kementerian Keuangan dapat dilakukan sesuai jadwal dan mendukung kelancaran pelaksanaan program tahun 2026.

13. Rapat Pembahasan usulan revisi kewenangan KPA, kegiatan dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2025.

Rapat membahas usulan revisi anggaran kewenangan KPA Tahun 2025 pada unit kerja Eselon II lingkup Ditjen PDSPKP dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan program dan optimalisasi penggunaan anggaran. Revisi yang diusulkan pada prinsipnya berupa pergeseran anggaran antar akun dalam rincian output yang sama tanpa mengubah pagu anggaran. Setiap unit kerja memaparkan penyesuaian anggaran sesuai kebutuhan kegiatan, serta memastikan kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Mekanisme revisi dilakukan melalui aplikasi SAKTI sesuai PMK Nomor 107 Tahun 2024,

dengan tujuan mempercepat pencapaian kinerja, meningkatkan kualitas belanja, serta mendukung pelaksanaan program secara optimal.

14. Rapat Pembahasan terkait pengalokasian dan pemanfaatan anggaran pada RO Khusus serta pemblokiran anggaran dalam rangka pemenuhan Prioritas Direktif Presiden TA 2026, kegiatan dilaksanakan pada tanggal 17 Desember 2025.

Rapat membahas pengalokasian dan pemanfaatan anggaran pada Rincian Output (RO) Khusus serta pemblokiran anggaran dalam rangka pemenuhan Prioritas Direktif Presiden Tahun Anggaran 2026 di lingkungan Ditjen PDSPKP. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan dukungan anggaran yang dapat dimanfaatkan secara cepat dengan tetap menjaga tata kelola yang baik. Dalam rapat disampaikan bahwa Kementerian Keuangan melakukan identifikasi terhadap belanja rutin dan administratif untuk dialokasikan ke RO Khusus atau diberikan catatan blokir sesuai ketentuan. Setiap unit Eselon I diminta membentuk KRO dan RO Khusus sesuai mekanisme yang telah ditetapkan serta menempatkannya pada program dan kegiatan yang sesuai kebutuhan. Total alokasi RO Khusus Ditjen PDSPKP dalam rangka Prioritas Direktif Presiden TA 2026 sebesar Rp53,53 miliar. Revisi anggaran dilaksanakan melalui aplikasi SAKTI sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan tujuan meningkatkan efektivitas pelaksanaan program dan pencapaian prioritas nasional.

Dalam rangka pencapaian indikator kinerja ini, Sekretariat Ditjen PDSPKP telah merealisasikan anggaran sebesar Rp316.665.000 sampai dengan Desember 2025 atau setara dengan 99,98% dari pagu anggaran sebesar Rp316.665.000, dengan efisiensi anggaran sebesar Rp69.316.

8. Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Nilai)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 2008, Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai

untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Tujuan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah untuk menjelaskan secara rinci mengenai kondisi SPIP serta mewujudkan budaya pengendalian intern (internal control culture) dalam rangka menciptakan pengendalian intern yang handal agar tercapai keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efisien dan efektif, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan di lingkungan Kementerian.

Tingkat maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah tingkat kematangan/kesempurnaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dalam mencapai tujuan pengendalian intern. Penilaian maturitas SPIP dilakukan melalui penilaian pelaksanaan SPIP/manajemen risiko; pengelolaan keuangan, pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

Tabel 11. Ikhtisar Pencapaian Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP Ditjen PDSPKP

Indikator Kinerja (1)	Tahun (2)	Target (3)	Realisasi (4)	Persentase Realisasi Terhadap Target (5)	Target RPJMN (6)	Realisasi S.d 2025 (7)	Persentase Realisasi S.d 2025 terhadap Target RPJMN (8)
Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP Ditjen PDSPKP (Nilai)	2025	3,5	3,68	105,14	3,9	3,68	94,36
	2024	3,30	4,07	123,33			

Capaian Indikator Kinerja Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP Ditjen PDSPKP tahun 2025 sebesar 3,68 atau setara 105,14% terhadap target 2025 sebesar 3,5. Capaian tersebut setara dengan 94,36% terhadap target RPJMN 2025-2029 sebesar 3,9. Capaian tahun 2025 lebih rendah jika dibandingkan dengan capaian tahun 2024 sebesar 4,07. Tahun 2025 merupakan tahun pertama pada periode Rencana Strategis (Renstra) 2025-2029 sehingga capaiannya belum dapat dibandingkan dengan capaian tahun-tahun sebelumnya pada periode Renstra yang sama.

Sekretariat Ditjen PDSPKP telah melaksanakan kegiatan dalam rangka pencapaian indikator kinerja ini antara lain:

- a. Melaksanakan kegiatan pengendalian sistem pengendalian intern terkait Penyelenggaraan Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan (PIPK) tahun 2025 pada tanggal 27 November 2025, Kegiatan diikuti oleh Biro Keuangan KKP dan perwakilan tim PIPK lingkup Ditjen PDSPKP. kegiatan bertujuan untuk melakukan koordinasi persiapan reviu PIPK Ditjen PDSPKP oleh inspektorat Jenderal KKP, yang meliputi Penetapan Akun Signifikan pada tabel A, hasil pengujian pengendalian tingkat entitas (Tabel B.1), pengendalian umum teknologi, informasi dan komunikasi (Tabel B.2), pengujian atribut pengendalian (Tabel C.1), dan pengujian pengendalaian aplikasi (Tabel C.2).



Gambar 17. Kegiatan pengendalian sistem pengendalian intern

- b. Melaksanakan kegiatan persiapan evaluasi maturitas SPIP KKP Tahun 2025 bersama BPKP yang dilaksanakan pada tanggal 19 Desember 2025, pelaksanaan kegiatan dihadiri oleh perwakilan tim kerja lingkup Sekretariat Ditjen PDSPKP. Pelaksanaan kegiatan bertujuan untuk melakukan verifikasi atas kelengkapan dan kesesuaian data dukung SPIP pada KK Lead 2.1 Penilaian Penetapan Tujuan Sasaran Program, KK

Lead 2.2 Penilaian Penetapan Tujuan Sasaran Kegiatan, KK Lead 2.3 Penilaian Penetapan Tujuan Rincian Output, dan KK 3.1 Penilaian Struktur dan Proses Efektivitas dan Efisiensi Pencapaian Tujuan Organisasi.

- c. Mengikuti rapat evaluasi atas maturitas sistem perngendalian intern pemerintah pada kementerian kelautan dan perikanan tahun 2025 pada tanggal 22 Desember 2025 di ruang rapat wisma Gracillaria. Pelaksanaan kegiatan di ikuti oleh Tim SPIP Biro Perencanaan, Biro Perencanaan, Inspektorat Jenderal Mitra Eselon I KKP, Perwakilan Tim SPIP Maturitas Lingkup Ditjen PDSPKP dan Tim Evaluasi dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Pelaksanaan kegiatan evaluasi lingkup Ditjen PDSPKP terkait pembahasan data pada KK 2.1 Penetapan Tujuan Sasaran Program, KK 2.2 Penetapan Tujuan Sasaran Kegiatan, KK 2.3 Penetapan Tujuan Rincian Output, dan verifikasi kelengkapan dokumen pada KK 3.1 Penilaian Struktur dan Proses Efektivitas dan Efisiensi Pencapaian Tujuan Organisasi.



Gambar 18. rapat evaluasi atas maturitas sistem perngendalian intern pemerintah

Dalam rangka pencapaian indikator kinerja ini, Sekretariat Ditjen PDSPKP telah merealisasikan anggaran sebesar Rp9.532.500 atau setara dengan 97,42% dari pagu anggaran sebesar Rp9.785.000, dengan efisiensi anggaran sebesar Rp252.500.

9. Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Indeks)

Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas-tugasnya. Indeks profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan (Permen PAN dan RB Nomor 38 Tahun 2018).

Nilai diukur setiap tahun dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, meliputi:

- Kualifikasi dengan bobot 25% yang dihitung dari kondisi tingkat pendidikan terakhir dari pegawai dengan ketentuan sesuai SK Pangkat Terakhir atau SK Pencantuman Gelar yang diupdate pada aplikasi SIASN BKN;
- Kompetensi dengan bobot 40% yang diolah datanya dari aplikasi MyASN BKN berdasarkan Penghitungan nilai pelatihan struktural/fungsional/kursus/seminar;
- Kinerja dengan bobot 30% berdasarkan hasil penilaian Kinerja Pegawai pada Aplikasi Kinerja Pegawai BKN , dan
- Disiplin dengan bobot 5% diolah datanya dari aplikasi MyASN dengan ketentuan diambil yang tidak pernah/pernah dijatuhi hukuman disiplin selama 5 tahun terakhir.

Tabel 12. Ikhtisar Pencapaian Indeks Profesionalitas ASN di lingkungan Setditjen PDSPKP

Indikator Kinerja (1)	Tahun (2)	Target (3)	Realisasi (4)	Persentase Realisasi Terhadap Target (5)	Target RPJMN (6)	Realisasi S.d 2025 (7)	Persentase Realisasi S.d 2025 terhadap Target RPJMN (8)
Indeks Profesionalitas ASN Ditjen PDSPKP (Indeks)	2025	81	87,13	107,57	83	87,13	104,98
	2024	87,00	89,12	102,44			

Capaian Indikator Indeks Profesionalitas ASN lingkup Ditjen PDSPKP tahun 2025 sebesar 87,13, atau setara dengan 107,57% dari target tahun 2025 sebesar 81. Capaian tersebut setara dengan 104,98% dari target RPJMN 2025-2029 sebesar 83. Capaian tahun 2025 lebih rendah jika dibandingkan dengan capaian tahun 2024 sebesar 89,12, tetapi masih lebih tinggi jika dilihat dari persentase capaian terhadap targetnya. Tahun 2025 merupakan tahun pertama pada periode Rencana Strategis (Renstra) 2025-2029 sehingga capaiannya belum dapat dibandingkan dengan capaian tahun-tahun sebelumnya pada periode Renstra yang sama.

Setditjen PDSPKP telah melaksanakan beberapa kegiatan dalam rangka pencapaian indeks profesionalitas ASN lingkup Setditjen PDSPKP selama Triwulan IV Tahun 2025 antara lain:

- a. Pengarahan dan Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja tahun 2024 lingkup Ditjen PDSPKP tanggal 2 Oktober 2025;
- b. Validasi dan persiapan pelaksanaan ujian dinas dan ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah bagi pegawai Ditjen PDSPKP pada tanggal 8 Oktober 2025;
- c. Verifikasi berkas dan persiapan assessment Tugas Belajar, penilaian kompetensi jabatan fungsional bagi pegawai Ditjen PDSPKP pada tanggal 9, 22, dan 27 Oktober 2025, serta 23 Desember 2025
- d. Penyusunan standar kompetensi jabatan bagi pejabat struktural lingkup Ditjen PDSPK pada tanggal 10 dan 17 Oktober 2025;
- e. Rapat Monitoring dan Evaluasi Disiplin dan Kinerja Pegawai Triwulan III Tahun 2025 tanggal 15 Oktober 2025;
- f. Rapat pembahasan Document Management System pada aplikasi SIASN pada tanggal 16 Oktober 2025;
- g. Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Pejabat Fungsional lingkup Ditjen PDSPKP pada tanggal 30 Oktober 2025;
- h. Rapat Pengarahan Peserta Magang Nasional lingkup Ditjen PDSPKP pada tanggal 26 November 2025;
- i. Rapat Pembahasan Penataan Pegawai dan Pengisian Jabatan Struktural lingkup Ditjen PDSPKP pada tanggal 26 November 2025;

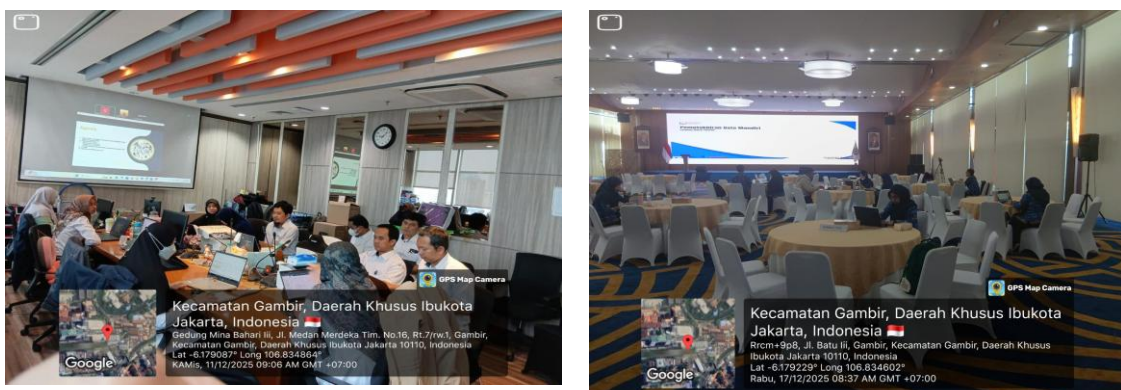
- j. Rapat Sosialisasi Permen PANRB No. 6 tahun 2022 & Bimtek Pengisian SKP lingkup Ditjen PDSPKP pada tanggal 5 Desember 2025
- k. Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan pengawas dan pejabat fungsional lingkup Ditjen PDSPKP pada tanggal 15 Desember 2025;
- l. Rapat Kerja Penyusunan Rencana Pengembangan Kompetensi ASN melalui *Corporate University* KKP pada tanggal 18–19 November 2025;
- m. Rapat Pemutakhiran Data Mandiri pada aplikasi MyASN pada tanggal 2, 11, 17, dan 30 Desember 2025



Gambar 19. Pengarahan dan Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja tahun 2024



Gambar 20. Monitoring dan Evaluasi Disiplin dan Kinerja Pegawai Triwulan III



Gambar 21. Rapat Pemutakhiran Data Mandiri pada aplikasi MyASN



Gambar 22. Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan pengawas dan pejabat fungsional lingkup Ditjen PDSPKP

Dalam rangka pencapaian indikator kinerja ini, Sekretariat Ditjen PDSPKP telah merealisasikan anggaran sebesar Rp77.716.870 sampai dengan Desember 2025 atau setara dengan 99,99% dari pagu anggaran sebesar Rp77.720.000, dengan efisiensi anggaran sebesar Rp3.130.

10. Persentase penyelesaian program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (Persen)

Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 93 Tahun 2024 tentang Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025, peraturan menteri yang akan disusun Ditjen PDSPKP tahun 2025 meliputi:

- a. Rancangan Peraturan Menteri tentang Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Sektor Kelautan dan Perikanan; dan
- b. Rancangan Peraturan Menteri tentang Indikasi Geografis Hasil Kelautan dan Perikanan.

Tabel 13. Ikhtisar pencapaian Persentase penyelesaian program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (Persen)

Indikator Kinerja (1)	Tahun (2)	Target (3)	Realisasi (4)	Persentase Realisasi Terhadap Target (5)	Target RPJMN (6)	Realisasi S.d 2025 (7)	Persentase Realisasi S.d 2025 terhadap Target RPJMN (8)
Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Bidang PDSPKP (Persen)	2025	100	100	100	100	100	100
	2024	100	100	100			

Capaian indikator kinerja Persentase penyelesaian program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan tahun 2025 sebesar 100% atau setara 100% baik terhadap target tahun 2025 maupun target RPJMN 2025-2029 sebesar 100%. Tahun 2025 memiliki capaian yang sama jika dibandingkan dengan capaian pada tahun 2024 yaitu sebesar 100%. Tahun 2025 merupakan tahun pertama pada periode Rencana Strategis (Renstra) 2025-2029 sehingga capaiannya belum dapat dibandingkan dengan capaian tahun-tahun sebelumnya pada periode Renstra yang sama.

Capaian diperoleh dengan membandingkan jumlah peraturan menteri dan keputusan menteri yang diselesaikan (penyampaian permohonan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan kepada Kementerian Hukum dan HAM atau penyampaian penetapan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan kepada Menteri) hingga 31 Desember 2025, dibandingkan dengan jumlah peraturan menteri dan keputusan menteri yang direncanakan sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 93 Tahun 2024 tentang Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025.

Berdasarkan Nota Dinas Sekretaris Jenderal Nomor 50/SJ.4/TU.210/I/2026 tanggal 6 Januari 2026 hal Penyampaian Capaian

Indikator Kinerja Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Semester II Tahun 2025, realisasi Ditjen PDSPKP adalah sebesar 100%. Sehubungan dengan penyelesaian kedua rancangan peraturan menteri dimaksud, dapat disampaikan progres yang telah dilakukan oleh Ditjen PDSPKP pada tahun 2025, di antaranya:

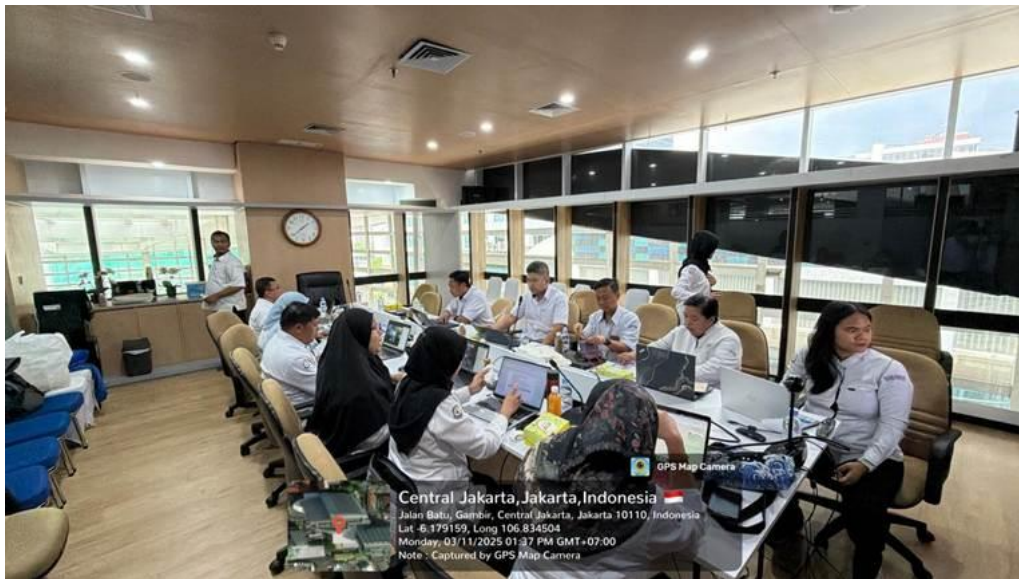
- a. Penyampaian Permohonan Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah Sektor Kelautan dan Perikanan oleh Sekretaris Jenderal KKP kepada Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Kementerian Hukum melalui surat Nomor B.1039/SJ/HK.160/X/2025 tanggal 14 Oktober 2025.
- b. Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Indikasi Geografis Hasil Kelautan dan Perikanan pada tanggal 23 Oktober 2025 berdasarkan undangan Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Nomor PPE.PP.01.05-3940 tanggal 6 Oktober 2025.



Gambar 23. Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Indikasi Geografis Hasil Kelautan dan Perikanan pada tanggal 23 Oktober 2025

- c. Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah Sektor Kelautan dan Perikanan pada tanggal 3 November 2025

berdasarkan undangan Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Nomor PPE.PP.01.05 4463 tanggal 28 Oktober 2025.



Gambar 24. Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah Sektor KP

Dalam rangka pencapaian indikator kinerja ini, Sekretariat Ditjen PDSPKP telah merealisasikan anggaran sebesar Rp440.811.837, atau setara dengan 99,91% dari pagu anggaran sebesar Rp441.209.000, dengan efisiensi anggaran sebesar Rp397.163.

11. Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Nilai)

Pengawasan kearsipan adalah proses kegiatan dalam menilai kesesuaian antara prinsip, kaidah dan standar kearsipan dengan penyelenggaraan kearsipan. Arsip yang tercipta dari kegiatan lembaga negara, pemerintah daerah, dan kegiatan yang menggunakan sumber dana negara merupakan memori, acuan dan bahan pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan negara sehingga perlu dilakukan usaha penyelamatan secara terpadu, sistematis dan komprehensif sehingga diperlukan pengawasan kearsipan sesuai dengan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengawasan Kearsipan.

Kegiatan Pengawasan Kearsipan Internal di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2025 yaitu dilakukannya verifikasi terhadap dokumen data dukung pengawasan oleh Tim Penilai Pengawasan Kearsipan KKP Tahun 2025. Tahun 2025 target nilai pengawasan kearsipan di lingkungan Ditjen PDSPKP sebesar 80.

Tabel 14. Ikhtisar Pencapaian Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP

Indikator Kinerja (1)	Tahun (2)	Target (3)	Realisasi (4)	Persentase Realisasi Terhadap Target (5)	Target RPJMN (6)	Realisasi S.d 2024 (7)	Persentase Realisasi S.d 2024 terhadap Target RPJMN (8)
Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup Ditjen PDSPKP	2025	80	99,40	124,25	84	99,40	118,33
	2024	75	99,39	132,52			

Capaian Indikator Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP tahun 2025 sebesar 99,40 atau setara 124,25% terhadap target 2025 sebesar 80. Capaian tersebut setara 118,33% jika dibandingkan dengan target RPJMN 2025-2029 sebesar 84. Capaian tahun 2025 mengalami pertumbuhan sebesar 0,01% jika dibandingkan dengan capaian pada tahun 2024 yaitu sebesar 99,39. Tahun 2025 merupakan tahun pertama pada periode Rencana Strategis (Renstra) 2025-2029 sehingga capaiannya belum dapat dibandingkan dengan capaian tahun-tahun sebelumnya pada periode Renstra yang sama.

Adapun upaya yang telah dilakukan Setditjen PDSPKP untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan pengawasan kearsipan antara lain:

- Kegiatan pelaksanaan kegiatan pemusnahan arsip lingkup Direktorat Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan pada tanggal 9 Oktober 2025 di PT. Indoarsip Kertaskarya Buanasentosa, Cikarang Selatan .



Gambar 25. Pemusnahan Arsip lingkup Direktorat Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan

- b. Kegiatan Penataan Arsip Inaktif (Arsip Keuangan) sampai dengan 3 - 7 November 2025 di Record Center Raiser Ikan Hias Cibinong, Jawa Barat
- c. Kegiatan Penataan Arsip Inaktif pada tanggal sampai dengan 1 – 20 Desember 2025 di Record Center Raiser Ikan Hias Cibinong, Jawa Barat



Gambar 26. Penataan Arsip Inaktif

Dalam rangka pencapaian indikator kinerja ini, Sekretariat Ditjen PDSPKP telah merealisasikan anggaran sebesar Rp240.439.662 sampai dengan Desember 2025 atau setara dengan 99,87% dari pagu anggaran sebesar Rp240.759.000, dengan efisiensi anggaran sebesar Rp319.338.1

12. Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Persen)

Rencana Umum Pengadaan (RUP) adalah instrumen penting dalam meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah yang dilaksanakan melalui proses pengadaan barang/jasa. Melalui RUP,

pemerintah mengumumkan secara terbuka pemaketan pengadaan yang akan dilaksanakan oleh KKP. Pengukuran terhadap persentase RUP yang diumumkan pada SiRUP dapat merepresentasikan kualitas perencanaan PBJ di KKP. Nilai pada indikator ini didapatkan dari persentase nilai pengadaan barang/jasa yang diumumkan dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) dibandingkan dengan nilai pagu pengadaan suatu unit kerja mandiri (Satuan Kerja). Pagu pengadaan merupakan pagu program dikurangi belanja pegawai dan pagu non pengadaan. Adapun ketentuan mengenai Persentase Rencana Umum Pengadaan dijabarkan pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Pasal 11 Ayat (1). Penarikan data dilaksanakan setiap tanggal 1 pada Triwulan berikutnya.

Tabel 15. Ikhtisar Pencapaian Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP

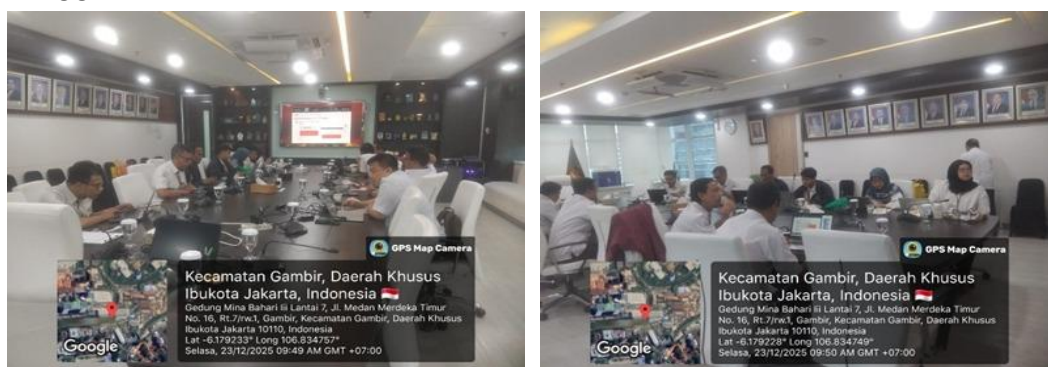
Indikator Kinerja (1)	Tahun (2)	Target (3)	Realisasi (4)	Persentase Realisasi Terhadap Target (5)	Target RPJMN (6)	Realisasi S.d 2025 (7)	Persentase Realisasi S.d 2025 terhadap Target RPJMN (8)
Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP Lingkup Ditjen PDSPKP (persen)	2025	76	100	131,58	80	100	125

Capaian indikator kinerja Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP tahun 2025 sebesar 100% atau setara 131,58%. Capaian tersebut setara 125% jika dibandingkan dengan target RPJMN 2025-2029 sebesar 80%. Indikator ini merupakan indikator baru sehingga tidak dapat dibandingkan dengan capaian pada tahun sebelumnya. Tahun 2025 merupakan tahun pertama pada periode Rencana Strategis (Renstra) 2025-2029 sehingga capaiannya belum dapat

dibandingkan dengan capaian tahun-tahun sebelumnya pada periode Renstra yang sama.

Sekretariat Ditjen PDSPKP telah melaksanakan beberapa kegiatan dalam rangka pencapaian indikator kinerja ini antara lain:

- a. Rapat Pengadaan renovasi ruang Direktorat Akses Pasar dan Promosi yang diselenggarakan pada tanggal 3 November 2025 yang dihadiri oleh perwakilan Biro Pengadaan Barang dan Jasa dan Sekretariat Direktorat Jenderal PDSPKP.
- b. Rapat pemutakhiran SIRUP dilaksanakan pada tanggal 23 Desember 2025 yang dihadiri oleh perwakilan Biro Pengadaan Barang/Jasa Setjen KKP dan Perwakilan unit kerja lingkup Ditjen PDSPKP. Rapat membahas input Rencana Umum Pengadaan (RUP) tahun anggaran 2026 menggunakan sistem SIRUP.



Gambar 27. Rapat pemutakhiran SIRUP

Dalam rangka pencapaian indikator kinerja ini, Sekretariat Ditjen PDSPKP telah merealisasikan anggaran sebesar Rp10.963.000, atau setara dengan 98,38% dari pagu anggaran sebesar Rp10.963.000 sampai dengan Desember 2025, dengan efisiensi anggaran sebesar Rp178.000.

13. Persentase Penyelesaian Proses Bisnis Level 2 dan 3 serta SOP Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Persen)

Probis KKP terdiri atas: Probis Level 0; Probis Level 1; Probis Level 2; Probis Level 3. Probis Level 0 dan Level 1 telah diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Proses Bisnis di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, sedangkan untuk Probis

Level 2 dan Level 3 ditetapkan dengan Keputusan Menteri. Penyusunan SOP berdasarkan Probis Level 3.

Tabel 16. Ikhtisar Pencapaian Persentase Penyelesaian Proses Bisnis Level 2 dan 3 serta SOP Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP

Indikator Kinerja (1)	Tahun (2)	Target (3)	Realisasi (4)	Persentase Realisasi Terhadap Target (5)	Target RPJMN (6)	Realisasi S.d 2025 (7)	Persentase Realisasi S.d 2025 terhadap Target RPJMN (8)
Persentase Penyelesaian Proses Bisnis Level 2 dan 3 SOP Lingkup Ditjen PDSPKP	2025	65	65	100	85	65	76,47

Capaian indikator kinerja Persentase Penyelesaian Proses Bisnis Level 2 dan 3 serta identifikasi SOP Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP tahun 2025 sebesar 65 atau setara dengan 100% terhadap target 2025 sebesar 65. Capaian tersebut setara 76,47% jika dibandingkan dengan target RPJMN 2025-2029 sebesar 85. Indikator kinerja ini merupakan indikator baru pada tahun 2025 sehingga belum dapat dibandingkan dengan capaian pada tahun sebelumnya. Tahun 2025 merupakan tahun pertama pada periode Rencana Strategis (Renstra) 2025-2029 sehingga capaiannya belum dapat dibandingkan dengan capaian tahun-tahun sebelumnya pada periode Renstra yang sama.

Sekretariat Ditjen PDSPKP telah melaksanakan beberapa kegiatan dalam rangka pencapaian indikator kinerja ini antara lain:

- Rapat Perubahan Tugas dan Fungsi UPT Balai Besar Pengujian Penerapan Produk Kelautan dan Perikanan bersama dengan seluruh unit kerja eselon II pusat/direktorat dan perwakilan BBP3KP untuk merumuskan fungsi yang *di-cascading* ke UPT BBP3KP sebagaimana telah ditentukan dalam proses bisnis Ditjen PDSPKP. Rapat dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 15 Oktober 2025;
- Rapat Penyusunan Klasifikasi UPT Ditjen PDSPKP bersama dengan Biro SDM Aparatur dan Organisasi dan unit kerja eselon II lingkup Ditjen PDSPKP. Penyusunan Klasifikasi UPT berdasarkan variabel utama dan

variabel pendukung. Rapat dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 21 Oktober 2025;

- c. Rapat finalisasi identifikasi uraian fungsi Unit Pelaksana Teknis Ditjen PDSPKP bersama dengan seluruh unit kerja eselon II pusat/direktorat untuk menentukan tugas dan fungsi calon UPT Ditjen PDSPKP yang akan diturunkan sesuai dengan proses bisnis masing-masing unit kerja. Rapat dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 11 November 2025;
- d. Rapat monitoring dan evaluasi (Monev) SOP lingkup Ditjen PDSPKP pasca penyesuaian organisasi dan tata kerja yang baru pada tanggal 4 Desember 2025, dengan agenda utama membahas evaluasi implementasi SOP setelah perubahan OTK. Kegiatan ini bertujuan memastikan setiap unit kerja telah mengadaptasi SOP terbaru sesuai Proses Bisnis Level 2 dan 3 serta mengidentifikasi bagian yang memerlukan penyesuaian atau perbaikan lebih lanjut.



Gambar 28. Rapat Penyusunan Klasifikasi UPT Ditjen PDSPKP



Gambar 29. Rapat Monev SOP lingkup Ditjen PDSPKP

Dalam rangka pencapaian indikator kinerja ini, Sekretariat Ditjen PDSPKP telah merealisasikan anggaran sebesar Rp41.802.000 sampai dengan Desember 2025 atau setara dengan 100% dari pagu anggaran sebesar Rp41.802.000.

14. Nilai Proposal Inovasi Pelayanan Publik Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Nilai)

Berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah, inovasi pelayanan publik adalah terobosan jenis pelayanan publik baik yang merupakan gagasan/ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan kata lain, inovasi pelayanan publik sendiri tidak mengharuskan suatu penemuan baru, melainkan pula mencakup satu pendekatan baru bersifat kontekstual baik berupa inovasi pelayanan publik hasil dari perluasan maupun peningkatan kualitas pada inovasi pelayanan publik yang ada.

Berdasarkan Pedoman Menteri PAN RB No. 1 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah Tahun 2025 Berdasarkan Efisiensi Anggaran, Kriteria inovasi mencakup: memiliki kebaruan, efektif, bermanfaat, mudah disebarkan, dan berkelanjutan. Klasifikasi inovasi mencakup: Kelompok Umum dan Kelompok Khusus. Untuk semua pelayanan yang dilakukan Unit Pelayanan Publik (UPP) lingkup Ditjen PDSPKP masuk ke dalam kelompok umum. Tema KIPP 2025 yaitu Mewujudkan Pelayanan Publik Berdampak Untuk Kesejahteraan Masyarakat.

PENILAIAN PROPOSAL (45%)

No.	Aspek	Bobot	Sub-Aspek	Bobot
1	Kebaruan	14%	Latar Belakang	19%
			Tujuan	23%
			Cara Implementasi	30%
			Kebaruan Gagasan	28%
2	Efektifitas dan Manfaat	52%	Mekanisme Monev	31%
			Dampak Inovasi	69%
3	Adaptabilitas	17%	Difusi dan Replikasi Inovasi	100%
4	Keberlanjutan	17%	Sumber Daya	42%
			Strategi Keberlanjutan	58%

PENILAIAN OLEH TPI (40%)

No.	Aspek	Bobot	Sub-Aspek	Bobot
1	Fisibilitas Nasional	100%	Berdayaguna	43%
			Kompleksitas	25%
			Kompatibilitas	21%
			Kolaboratif	11%

PENILAIAN OLEH MASYARAKAT (15%)

No.	Aspek	Bobot	Sub-Aspek	Bobot
1	Pengetahuan Masyarakat tentang Inovasi	50%	Mengetahui inovasi	25%
			Memahami konsep dan tujuan inovasi	25%
2	Dampak dan Manfaat Inovasi	50%	Merasakan dampak dan manfaat	25%
			Sejauhmana dampak dirasakan	25%

Gambar 30. Aspek dan bobot penilaian Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik pada tahun 2025

Tabel 17. Ikhtisar Pencapaian Nilai Proposal Inovasi Pelayanan Publik Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP

Indikator Kinerja (1)	Tahun (2)	Target (3)	Realisasi (4)	Persentase Realisasi Terhadap Target (5)	Target RPJMN (6)	Realisasi S.d 2025 (7)	Persentase Realisasi S.d 2025 terhadap Target RPJMN (8)
Nilai Hasil Proposal Inovasi Pelayanan Publik Ditjen PDSPKP (Nilai)	2025	77	88,17	114,51	81	88,17	108,85
	2024	76,00	85,26	112,18			

Capaian indikator kinerja Nilai Proposal Inovasi Pelayanan Publik lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP tahun 2025 adalah sebesar 88,17 atau setara dengan 114,51% dari target 2025 sebesar 77. Capaian tersebut setara dengan 108,85% jika dibandingkan dengan target RPJMN 2025-2029 sebesar 81. Capaian 2025 mengalami pertumbuhan sebesar 3,41% jika dibandingkan dengan capaian pada tahun 2024 sebesar 85,26. Tahun 2025 merupakan tahun pertama pada periode Rencana Strategis (Renstra) 2025-2029 sehingga capaiannya belum dapat dibandingkan dengan capaian tahun-tahun sebelumnya pada periode Renstra yang sama.

Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Sekretariat Ditjen PDSPKP dalam rangka mendukung pencapaian target indikator kinerja ini antara lain:

- a. Rapat Pembahasan IKU terkait Inovasi Pelayanan Publik lingkup Ditjen PDSPKP, 31 Januari 2025;
- b. Rapat Penilaian Proposal KIPP Tahun 2025 Lingkup Ditjen PDSPKP, 14 Mei 2025;



Gambar 31. Rapat Penilaian Proposal KIPP Tahun 2025

- c. Finalisasi Pengisian Sinovik KIPP Ditjen PDSPKP Tahun 2025, 10 Juni 2025.



Gambar 32. Finalisasi Pengisian Sinovik KIPP Ditjen PDSPKP

- d. Rapat Monitoring dan Evaluasi Standar Pelayanan pada tanggal 1 Juli 2025;
- e. Rapat Koordinasi Pemenuhan Bukti Dukung PEKPPP Mandiri Lingkup Ditjen PDSPKP Tahun 2025 pada tanggal 23 Juli 2025;
- f. Evaluasi Mandiri Implementasi Pelayanan Publik lingkup Ditjen PDSPKP bersama Inspektorat IV pada tanggal 28 Juli-1 Agustus 2025;
- g. Rapat Koordinasi PEKPPP Mandiri Ditjen PDSPKP pada tanggal 15 September 2025;

- h. Monitoring Penyelenggaraan Pelayanan Publik Ramah Kelompok Rentan di Lingkungan Ditjen PDSPKP Tahun 2025 pada tanggal 23 September 2025; dan
- i. Pembahasan Hasil Validasi Data SKM Triwulan III Tahun 2025 pada tanggal 25 September 2025.

Dalam rangka pencapaian indikator kinerja ini, Sekretariat Ditjen PDSPKP telah merealisasikan anggaran sebesar Rp96.465.254 sampai dengan Desember 2025, atau setara dengan 99,92% dari pagu anggaran sebesar Rp96.545.000, dengan efisiensi anggaran sebesar Rp79.746.

15. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Persen)

Tingkat kepatuhan pengelolaan data kelautan dan perikanan adalah penilaian terhadap pencapaian kepatuhan dalam pengelolaan satu data KKP yang dihitung mulai level Provinsi dan Kabupaten/Kota berdasarkan pengumpulan, pengolahan, penyajian dan pelaporan data ke Unit Teknis yang ada di KKP sampai dengan Validasi Nasional. Data diambil dari pengisian kuesioner secara sampling, yang diisi oleh petugas Pengelola Data kelautan dan perikanan di tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota berdasarkan jumlah pelaku usaha yang telah teregister pada tahun sebelumnya. Untuk menentukan parameter termasuk kedalam kategori tidak patuh, cukup patuh, patuh dan sangat patuh terdapat 3 Variabel Perhitungan, yaitu:

- a. Persentase Jumlah Pelaku Usaha KP yang Terintegrasi (X1), Bobot Nilai 30%.
- b. Persentase Data Produksi KP yang Tervalidasi (X2), Bobot Nilai 40%.
- c. Persentase Realisasi Data Geospasial yang Terintegrasi (X3), Bobot Nilai 30%.

Tabel 18. Ikhtisar Pencapaian Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP

Indikator Kinerja (1)	Tahun (2)	Target (3)	Realisasi (4)	Persentase Realisasi Terhadap Target (5)	Target RPJMN (6)	Realisasi S.d 2025 (7)	Persentase Realisasi S.d 2025 terhadap Target RPJMN (8)
Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data Ditjen PDSPKP (%)	2025	91	100	109,89	100	100	100
	2024	91,00	100,00	109,89			

Capaian Indikator Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP tahun 2025 sebesar 100% atau setara 109,89 dari target tahun 2025 sebesar 91. Capaian tersebut setara dengan 100% jika dibandingkan dengan target RPJMN 2025-2029 sebesar 100. Capaian 2025 memiliki nilai yang sama dengan capaian tahun 2025. Tahun 2025 merupakan tahun pertama pada periode Rencana Strategis (Renstra) 2025-2029 sehingga capaiannya belum dapat dibandingkan dengan capaian tahun-tahun sebelumnya pada periode Renstra yang sama.

Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Sekretariat Ditjen PDSPKP dalam rangka mendukung pencapaian Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP antara lain:

- Validasi dan Verifikasi Titik Koordinat Bantuan Pemerintah Lingkup Ditjen PDSPKP, 14 Oktober 2025;
- Bimbingan Teknis Penginputan Data Produksi di Portal Data KKP, 16 Oktober 2025;
- Rapat Kelengkapan Data & Input Produksi Data Informasi Geospasial Tematik BP Lingkup Ditjen PDSPKP ke Portal Data, 20 November 2025;
- Rapat Persiapan Pra Validasi Nasional Portal Data Modul Valnas Bidang PDSPKP, 21 November 2025;
- Rapat Persiapan Pra Validasi Nasional Portal Data Modul Valnas Bidang PDSPKP, 28 November 2025;
- Persiapan Valnas PDS, 9 Desember 2025;
- Reviu Hasil Validasi Titik Koordinat BP, 30 Oktober 2025;

- h. Validasi Nasional Satudata Bidang PDSPKP, 10-12 Desember 2025; dan
- i. Pembahasan Hasil Validasi Data SKM Triwulan IV Tahun 2025.



Gambar 33. Validasi Nasional Satudata Bidang PDSPKP Tahun 2025

Dalam rangka pencapaian indikator kinerja ini, Sekretariat Ditjen PDSPKP telah merealisasikan anggaran sebesar Rp235.935.999, atau setara dengan 99,97% dari pagu anggaran sebesar Rp236.017.000, dengan efisiensi anggaran sebesar Rp81.001.

16. Pemenuhan Layanan Perkantoran Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Layanan)

Ruang lingkup layanan dukungan perkantoran adalah lingkup Ditjen PDSPKP, yang terdiri dari: (1) Terselenggaranya gaji dan tunjangan untuk pembayaran belanja pegawai (2) Operasional dan pemeliharaan kantor.

Tabel 18. Ikhtisar Pencapaian Pemenuhan Layanan Perkantoran Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Layanan)

Indikator Kinerja (1)	Tahun (2)	Target (3)	Realisasi (4)	Persentase Realisasi Terhadap Target (5)	Target RPJMN (6)	Realisasi S.d 2025 (7)	Persentase Realisasi S.d 2025 terhadap Target RPJMN (8)
Pemenuhan Layanan Perkantoran Lingkup Ditjen PDSPKP (Layanan)	2025	12	12	100	12	12	100
	2024	12	12	100			

Capaian indikator kinerja Pemenuhan Layanan Perkantoran Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP Tahun 2025 adalah sebesar 12 layanan atau setara 100% baik terhadap target 2025 maupun target RPJMN 2025-2029 sebesar 12 layanan.

Sekretariat Ditjen PDSPKP telah melaksanakan beberapa kegiatan dalam rangka pencapaian indikator kinerja ini di tahun 2025 antara lain:

- a. Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN Satker Pusat;
- b. Layanan Rumah Tangga dan Ketatausahaan;
- c. Pembayaran gaji PPNPN Satker Pusat;
- d. Pembayaran Gaji Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) Satker Pusat;
- e. Layanan Operasional dan Pemeliharaan Kantor Satker Pusat

Dalam rangka pencapaian indikator kinerja ini, Sekretariat Ditjen PDSPKP telah merealisasikan anggaran sebesar Rp69.120.722.609, atau setara dengan 99,02% dari pagu anggaran sebesar Rp70.463.320.000, dengan efisiensi anggaran sebesar Rp1.342.597.391.

17. Persentase Penyelesaian Permasalahan Hukum Lingkup

Direktorat Jenderal PDSPKP (Persen)

Persentase permasalahan hukum yang ditangani Lingkup Ditjen PDSPKP adalah masalah yang timbul terkait dengan pelaksanaan tugas berkaitan dengan pelaksanaan tugas di lingkungan Kelautan dan Perikanan khususnya pada Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan yang kemudian dilakukan serangkaian tindakan pemberian bantuan hukum baik di dalam maupun diluar pengadilan dan pemberian bantuan hukum sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15 Tahun 2022 tentang Advokasi Hukum di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15 Tahun 2022 tentang Advokasi Hukum di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Advokasi hukum meliputi bantuan hukum dan pembinaan hukum.

Tabel 19. Ikhtisar pencapaian Persentase Penyelesaian Permasalahan Hukum Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP

Indikator Kinerja (1)	Tahun (2)	Target (3)	Realisasi (4)	Persentase Realisasi Terhadap Target (5)	Target RPJMN (6)	Realisasi S.d 2025 (7)	Persentase Realisasi S.d 2025 terhadap Target RPJMN (8)
Persentase Penyelesaian Permasalahan Hukum Lingkup Ditjen PDSPKP	2025	100	100	100	100	100	100
	2024	100	100	100			

Capaian indikator kinerja persentase penyelesaian permasalahan hukum Lingkup Ditjen PDSPKP tahun 2025 yaitu sebesar 100% setara dengan 100% dari target 2025 dan target RPJMN 2025-2029. Capaian tahun 2025 tidak mengalami perubahan jika dibandingkan dengan capaian tahun 2024 yaitu sebesar 100%. Tahun 2025 merupakan tahun pertama pada periode Rencana Strategis (Renstra) 2025-2029 sehingga capaiannya belum dapat dibandingkan dengan capaian tahun-tahun sebelumnya pada periode Renstra yang sama.

Adapun pelayanan bantuan hukum yang ditangani oleh Ditjen PDSPKP pada 2025, di antaranya:

1. Pendampingan Hukum pada Sidang Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kupang
 - Tanggal 22 Oktober 2025, Kejaksaan Negeri Rote Ndao mengirimkan Surat kepada Sekretaris Ditjen PDSPKP Perihal Permohonan menghadiri Persidangan Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Rehabilitasi Unit Pengolahan Ikan (UPI) pada Dinas Perikanan Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2023 Nomor B-1139/N.3.23/Ft.1/10/2025:
 - Berdasarkan beberapa pertanyaan yang ditanyakan dalam persidangan, secara keseluruhan, Ditjen PDSPKP dapat menjawab dengan baik dengan disertai dengan bukti yang ada, namun terdapat satu pertanyaan yang tidak dapat dilengkapi alat buktinya dan disarankan oleh majelis hakim pada penyusunan petunjuk teknis

berikutnya untuk dapat dicantumkan lebih detail dan jelas, mengingat Pemerintah Pusat selaku regulator tidak dapat sepenuhnya melakukan pengawasan secara menyeluruh kepada Pemerintah Daerah dalam pelaksanaannya.

2. Advokasi TP Sambas 2015
3. Analisis Kepemilikan Kendaraan Roda 4 (empat) Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara
 - Berdasarkan penyampaian *resume* Koran *Perangi Korupsi* Nomor R.18/GMK/X/2025 tanggal 17 Oktober 2025 kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan mengenai kepemilikan kendaraan roda 4 (DL 8128) oleh Kelompok Nelayan Karunia, Kelurahan Beo, Kecamatan Beo, Kabupaten Kepulauan Talaud.
4. Pemberian Keterangan Di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara
 - dilaksanakan dalam rangka memenuhi panggilan berdasarkan surat Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Pada nomor B-1528/L.2.5/Fd.2/11/2025 tanggal 14 November 2025 dan nomor B-1573/L.2/Fd.2/11/ 2025 tanggal 25 November 2025 perihal Permintaan Keterangan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam Kegiatan Pemberian Bantuan Pemerintah berupa *Integrated Cold Storage* Kota Sibolga Tahun Anggaran 2018;
5. Permintaan keterangan ahli oleh Direktorat Kepolisian Perairan
 - berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/27/XRES.5.4./2025/Ditpolair tanggal 26 Oktober 2025 perkara dugaan terjadinya pelanggaran Tindak Pidana Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 Jo Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dalam Pasal 27 angka 26 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana, yang diketahui terjadi pada hari Sabtu tanggal 25 Oktober 2025 sekira pukul 22.30 WIB di Sekitar Jl. Malingping-Bayah, Kec.

Cihara Kab. Lebak Prov. Banten pada koordinat - 6.845269, 106.069796;

6. Permintaan Keterangan Dari Polda Metro Jaya Terkait Pekerjaan Pembangunan Prasarana dan Sarana di Luar Kawasan Pelabuhan SKPT Moa.

- Substansi pengaduan masyarakat yang menjadi dasar permintaan keterangan dari Polda Metro Jaya terkait pekerjaan pembangunan prasarana dan sarana di luar kawasan Pelabuhan SKPT Moa.
- tanggal 24 Desember 2025 diadakan Rapat Pembahasan Kesiapan Permintaan Keterangan Dari Polda Metro Jaya Terkait Pekerjaan Pembangunan Prasarana dan Sarana di Luar Kawasan Pelabuhan SKPT Moa;

Dalam rangka pencapaian indikator kinerja ini, Sekretariat Ditjen PDSPKP telah merealisasikan anggaran sebesar Rp440.811.837 sampai dengan Desember 2025, atau setara dengan 99,91% dari pagu anggaran sebesar Rp441.209.000, dengan efisiensi anggaran sebesar Rp397.163.

18. Persentase Dokumen Kerja sama yang disusun/ditindaklanjuti oleh Ditjen PDSPKP (Persen)

Sesuai dengan Permen KP No. 23 tahun 2022 tentang Pedoman Kerja Sama dan Penyusunan Perjanjian di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kerja Sama adalah kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan satu atau lebih lembaga/badan/organisasi, untuk mendukung kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dokumen kerja sama adalah dokumen formal pengikatan hukum terhadap rencana kerja sama dengan mitra kerja sama baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri yang dilaksanakan oleh Ditjen PDSPKP. Terdapat 2 bentuk dokumen kerjasama di KKP yaitu dokumen kerja sama nasional/antar lembaga dan internasional. Ada beberapa jenis kerja sama

yaitu kerja sama antar Lembaga, kerja sama bilateral, kerja sama regional dan multilateral.

Persentase dokumen kerjasama yang disusun/ditindaklanjuti oleh Ditjen PDSPKP adalah persentase dokumen kerjasama yang diterima/ditindaklanjuti oleh Ditjen PDSPKP. Dokumen yang diterima oleh Ditjen PDSPKP adalah dokumen usulan kerja sama yang dibedakan berdasarkan bentuk dokumen kerja samanya sedangkan Dokumen yang ditindaklanjuti oleh Ditjen PDSPKP adalah dokumen hasil kegiatan implementasi yang dibedakan berdasarkan kerangka kerja samanya.

Tabel 20. Ikhtisar Pencapaian Persentase Dokumen Kerjasama yang Disusun/Ditindaklanjuti oleh Ditjen PDSPKP

Indikator Kinerja (1)	Tahun (2)	Target (3)	Realisasi (4)	Persentase Realisasi Terhadap Target (5)	Target RPJMN (6)	Realisasi S.d 2025 (7)	Persentase Realisasi S.d 2025 terhadap Target RPJMN (8)
Persentase Dokumen Kerjasama yang Disusun/Ditindaklanjuti oleh Ditjen PDSPKP	2025	80	89,49	111,86	80	89,49	111,86
	2024	80	93,24	116,55			

Capaian Indikator Tingkat Persentase Dokumen Kerjasama yang Disusun/Ditindaklanjuti oleh Ditjen PDSPKP tahun 2025 sebesar 89,49 atau setara dengan 111,86 baik dari target tahun 2025 maupun target RPJMN 2025-2029 sebesar 80. Capaian tahun 2025 lebih rendah jika dibandingkan dengan capaian pada tahun 2024 sebesar 93,24. Tahun 2025 merupakan tahun pertama pada periode Rencana Strategis (Renstra) 2025-2029 sehingga capaiannya belum dapat dibandingkan dengan capaian tahun-tahun sebelumnya pada periode Renstra yang sama

Selama bulan Oktober – Desember 2025, Setditjen PDSPKP telah melakukan beberapa kegiatan yang mendukung pencapaian target indikator kinerja ini antara lain sebagai berikut:

- a. Kesepakatan Kerjasama Internasional Lingkup Ditjen PDSPKP

- 1) Mengikuti Pertemuan Koordinasi dan Penyusunan Kertas Posisi pada Pertemuan CTI-CFF: The Monitoring & Evaluation Working Group (MEWG) Regional Exchange and MEWG Meeting tanggal 1 Oktober 2025
- 2) Mengikuti Pertemuan Koordinasi dan Penyusunan Kertas Posisi pada Pertemuan CTI-CFF: The Seascape Regional Exchange (REX) back-to-back with the EAFM REX tanggal 2 Oktober 2025
- 3) Mengikuti Rapat Pembahasan MoU Perikanan dan Budidaya RI-Peru draf Joint Statement BPPMHKP-SANIPES tanggal 8 Oktober 2025
- 4) Mengikuti Rapat Persiapan Pertemuan Bilateral dengan Malaysia terkait permohonan klarifikasi atas temuan radioaktif pada udang ekspor ke Amerika Serikat tanggal 9 Oktober 2025
- 5) Mengikuti Rapat pembahasan *Counterdraft* MoU Indonesia-Brunei Darusallam tanggal 9 Oktober 2025
- 6) Mengikuti Rapat Pengajuan Concept Note Proyek Rumput Laut UNIDO - Global Climate Fund tanggal 13 Oktober 2025
- 7) Melaksanakan Technical Committee Meeting ke-3 UNIDO Global Quality Standard tanggal 14 Oktober 2025
- 8) Mengikuti Pertemuan dengan National Fisheries Institute Amerika Serikat tanggal 16 Oktober 2025
- 9) Mengikuti Rapat Persiapan Kunjungan Pemerintah Pantai Gading tanggal 20 Oktober 2025
- 10) Mengikuti Rapat JICA Project Validasi Bisnis SDGs untuk TUNA Scope tanggal 20 Oktober 2025
- 11) Mengikuti Rapat Penyusunan Memorandum of Understanding (MoU) ACIAR Australia tanggal 21 Oktober 2025
- 12) Mengikuti Rapat Pembahasan Kerja Sama dengan SIPPO Swiss tanggal 22 Oktober 2025
- 13) Mengikuti Rapat Pembahasan Kerja Sama antara KKP dan WWF-US tanggal 23 Oktober 2025
- 14) Mengikuti Rapat Pembahasan *Counterdraft* Memorandum of Understanding on Marine and Fisheries Cooperation antara

Kementerian Kelautan dan Perikanan RI dan Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying Republik India tanggal 27 Oktober 2025

- 15) Mengikuti Rapat Permohonan Masukan dan Pembahasan Naskah Pertimbangan Indonesia Canada CEPA tanggal 30 Oktober 2025
- 16) Mengikuti Rapat Persiapan pertemuan Indonesia – Rusia tanggal 30 Oktober 2025
- 17) Mengikuti Rapat Penyusunan Kertas Posisi Delri pada Pertemuan SEAFDEC 48PCM dan 28FCG/ASSP tanggal 30 Oktober 2025
- 18) Mengikuti Rapat Pembahasan Draf Joint Statement/Letter of Intent Kerja Sama Perikanan dan Budidaya RI – Rusia tanggal 3 November 2025
- 19) Mengikuti Rapat Pembahasan Proyek UNIDO - GCF : “Sustainable Seaweed for Climate Action” tanggal 4 November 2025
- 20) Mengikuti Rapat Pembahasan dengan World Bank tanggal 6 November 2025
- 21) Mengikuti Rapat Pembahasan Naskah Pertimbangan Indonesia Canada CEPA tanggal 6 November 2025
- 22) Mengikuti Rapat Koordinasi Persiapan Pembahasan Country Programming Framework (CPF) FAO 2026-2030 tanggal 7 November 2025
- 23) Mengikuti Rapat Tindak Lanjut Pengisian OECD Data Collection 2025 tanggal 7 November 2025
- 24) Mengikuti Rapat Rapat Persiapan Sosialisasi *Indonesia-Japan Economy Partnership Agreement* (IJEPA) tanggal 13 November 2025
- 25) Mengikuti Sosialisasi Protokol Indonesia–Japan Economic Partnership Agreement (I-JEPA) tanggal 14 November 2025
- 26) Mengikuti Rapat Pembahasan Rencana Kerja Sama Perikanan RI-Papua Nugini tanggal 19 November 2025
- 27) Mengikuti Pertemuan Kunjungan Komite Nasional Ekonomi Biru Libya ke Indonesia tanggal 24 November 2025
- 28) Mengikuti Rapat Pembahasan Kerja Sama RI dan Papua Nugini tanggal 26 November 2025

- 29) Melaksanakan Pertemuan Kunjungan Komite Nasional Blue Economy Libya ke BBP3KP tanggal 27 November 2025
- 30) Melaksanakan Rapat Penyusunan BAST Hibah GQSP UNIDO tanggal 28 November 2025
- 31) Mengikuti Rapat Pembahasan SE Protokol Perubahan IJEPA tanggal 1 Desember 2025
- 32) Mengikuti Validation Workshop Dokumen CPF FAO - Indonesia 2026 – 2030 tanggal 2 Desember 2025
- 33) Mengikuti Pertemuan Bilateral dengan Department of Fisheries Thailand tanggal 3 Desember 2025
- 34) Mengikuti Rapat Pembahasan Tindak Lanjut Kunjungan Delegasi Libya ke Indonesia tanggal 8 Desember 2025
- 35) Mengikuti Rapat Pembahasan Counter-draft MoU on Fisheries and Aquaculture Cooperation RI-Hongaria tanggal 9 Desember 2025
- 36) Melaksanakan Rapat Pembahasan BAST UNIDO internal Ditjen PDSPKP tanggal 11 Desember 2025
- 37) Melaksanakan Rapat Penyusunan BAST Hibah GQSP UNIDO lingkup KKP tanggal 17 Desember 2025
- 38) Mengikuti Rapat Persiapan Pertemuan dengan MAFF Jepang tanggal 22 Desember 2025
- 39) Mengikuti Rapat Persiapan Implementasi Protokol Perubahan IJEPA tanggal 23 Desember 2025
- 40) Mengikuti Rapat Pembahasan draft MOU RI - Angola tanggal 18 Desember 2025

b. Kesepakatan Kerjasama Antarlembaga Lingkup Ditjen PDSPKP

- 1) Melaksanakan Rapat Perpanjangan PKS Ditjen PDSPKP dengan Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) tanggal 1 Oktober 2025
- 2) Mengikuti Rapat Pembahasan Rancangan Nota Kesepahaman/Kesepakatan Bersama KKP dengan Kementerian Lain tanggal 3 Oktober 2025

- 3) Mengikuti Rapat pembahasan Kerja Sama EDF tanggal 8 Oktober 2025
- 4) Mengikuti Rapat Implementasi Kerja Sama antara KKP dan Yayasan WWF Indonesia tanggal 14 Oktober 2025
- 5) Mengikuti Rapat pembahasan Perjanjian Kerja Sama antara Ditjen PDS dan BPJPH tanggal 14 Oktober 2025
- 6) Mengikuti Rapat Pembahasan Kesepakatan Bersama antara Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan Kementerian Koperasi tanggal 17 Oktober 2025
- 7) Mengikuti Rapat Pembahasan Kesepakatan Bersama antara Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan Kementerian Pariwisata tanggal 17 Oktober 2025
- 8) Mengikuti Rapat Pembahasan Nota Kesepahaman antara Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan Kementerian Perhubungan tanggal 20 Oktober 2025
- 9) Mengikuti Pertemuan Pembahasan Rencana Kegiatan Kerja Sama Ditjen PDSPKP dan Sustainable Fisheries Partnership Foundation (SFPF) tanggal 22 Oktober 2025
- 10) Mengikuti Rapat Pembahasan Rencana Kerja Sama antara Ditjen PDSPKP dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) tanggal 23 Oktober 2025;
- 11) Melaksanakan Rapat Pembahasan Rencana Aksi Kerja Sama antara Ditjen PDSPKP dan BAPPEBTI tanggal 23 Oktober 2025.
- 12) Mengikuti Laporan Rapat Pembahasan Kerja Sama dengan Forum Maritim Bali tanggal 24 Oktober 2025
- 13) Mengikuti Rapat Pembahasan Draft Nota Kesepakatan Program Laut Sehat Bebas Sampah tanggal 28 Oktober 2025
- 14) Mengikuti Rapat Pembahasan NKB antara Kementerian Koperasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan tanggal 30 Oktober 2025
- 15) Mengikuti Rapat Koordinasi Pembahasan Draft PKS dengan BPJPH tanggal 31 Oktober 2025
- 16) Mengikuti Rapat Pembahasan Dokumen Rencana Kerja Nota Kesepakatan Antara KKP dan Pemerintah Provinsi NTB tanggal 31 Oktober 2025

- 17) Mengikuti Rapat Rencana Kerja Sama Kegiatan di Kawasan KNMP tanggal 3 November 2025
- 18) Melaksanakan Rapat Pembahasan Perjanjian Kerja Sama antara Ditjen PDSPKP dengan KPKP PTMA tanggal 7 November 2025
- 19) Audiensi dan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Ditjen PDSPKP dan Gerakan Ingat Selamat Layar Indonesia/GISLI tanggal 10 November 2025
- 20) Mengikuti Rapat Pembahasan Nota Kesepahaman antara Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan Badan Standarisasi Nasional tanggal 10 November 2025
- 21) Mengikuti Rapat Pembahasan Nota Kesepahaman antara Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan Badan Standarisasi Nasional tanggal 10 November 2025
- 22) Mengikuti Rapat Pembahasan Draft Kerja Sama antara Ditjen PDSPKP dan Badan Penyelenggara Jaminan Halal/BPJPH tanggal 12 November 2025
- 23) Mengikuti Rapat Kerja Sama dengan Himpunan Masyarakat Nelayan Indonesia/ HMNI tanggal 13 November 2025
- 24) Mengikuti Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Ditjen PDSPKP dan Ditjen Pemasyarakatan tanggal 17 November 2025
- 25) Mengikuti Rapat PKS Jaksa Agung Muda Tata Usaha Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan tanggal 18 November 2025
- 26) Mengikuti Rapat Pembahasan Kerja Sama dengan Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) tanggal 18 November 2025
- 27) Melaksanakan Rapat Pembahasan Kerja Sama dengan KPKP PTMA tanggal 18 November 2025
- 28) Melaksanakan Rapat Pembahasan Kerja Sama dengan KPKP PTMA tanggal 19 November 2025
- 29) Mengikuti Rapat Penyusunan Rencana Aksi Perjanjian Kerja Sama antara Ditjen PDSPKP dengan BAPPEBTI tanggal 25 November 2025

- 30) Melaksanakan Rapat Penyusunan Rencana Aksi Kerja Sama Ditjen PDSPKP dengan AP2HI tanggal 3 Desember 2025
- 31) Mengikuti Rapat Pembahasan Naskah PKS BBP3KP dengan Wanita PUI tanggal 3 Desember 2025
- 32) Melaksanakan Rapat Penyusunan Rencana Aksi PKS Ditjen PDSPKP dengan Forum Maritim Bali tanggal 8 Desember 2025

Dalam rangka pencapaian indikator kinerja ini, Sekretariat Ditjen PDSPKP telah merealisasikan anggaran sebesar Rp314.332.805, atau setara dengan 99,49% dari pagu anggaran sebesar Rp315.532.000, dengan efisiensi anggaran sebesar Rp1.199.195.

19. Rasio Jumlah Pemberitaan Negatif Bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan terhadap Total Pemberitaan Bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (Persen)

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), setiap Kementerian / Lembaga wajib menyediakan dan melayani informasi publik secara terbuka, transparan, dan bertanggung jawab. Pemberitaan tentang Ditjen PDSPKP adalah penyampaian informasi/cerita/keterangan mengenai kejadian atau peristiwa yang berkaitan dengan Ditjen PDSPKP. Pemberitaan negatif adalah informasi/cerita/keterangan dalam bentuk artikel yang mengandung sentimen negatif. Media massa yang dihitung adalah media cetak dan online yang telah terdaftar pada Dewan Pers Indonesia.

Tabel 21. Ikhtisar Pencapaian Rasio Jumlah Pemberitaan Negatif Bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan terhadap Total Pemberitaan Bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan

Indikator Kinerja (1)	Tahun (2)	Target (3)	Realisasi (4)	Persentase Realisasi Terhadap Target (5)	Target RPJMN (6)	Realisasi S.d 2025 (7)	Persentase Realisasi S.d 2025 terhadap Target RPJMN (8)
Rasio Jumlah Pemberitaan Negatif Bidang Penguatan Daya Saing Produk KP Terhadap Total Pemberitaan Bidang Penguatan Daya Saing Produk KP	2025	≤5	0	120	≤5	0	120
	2024	≤5	0	120			

Capaian Rasio Jumlah Pemberitaan Negatif Bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan terhadap Total Pemberitaan pada Tahun 2025 adalah sebesar 0% atau setara 120% baik terhadap target 2025 maupun target RPJMN 2025-2029 sebesar ≤5. Nilai tersebut juga sama dengan capaian pada tahun 2024. Tahun 2025 merupakan tahun pertama pada periode Rencana Strategis (Renstra) 2025-2029 sehingga capaiannya belum dapat dibandingkan dengan capaian tahun-tahun sebelumnya pada periode Renstra yang sama

Dalam rangka mempertahankan capaian positif tersebut dan memperkuat citra bidang PDSPKP di ruang publik, Sekretariat Ditjen PDSPKP telah melaksanakan sejumlah kegiatan sebagai berikut:

- a. Penyebaran Narasi Positif secara Masif di Media Sosial Melalui kanal resmi media sosial Ditjen PDSPKP (Instagram, Facebook, Twitter, Tiktok dan Youtube), dilakukan publikasi rutin untuk memperkuat citra positif sektor kelautan dan perikanan khususnya bidang penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan. Konten yang diunggah menyoroti keberhasilan program dan kegiatan, kegiatan lapangan, data data capaian kinerja dan informasi seputar penguatan daya saing produk

kelautan dan perikanan. Selama TW IV 2025, salah satunya media sosial yang paling aktif dikunjungi publik adalah platform Instagram, dimana akun Instagram Ditjen PDSPKP telah menyampaikan konten narasi positif sebanyak 231 konten dengan jumlah *view (reach)* sebanyak 125.200, jumlah *like* sebanyak 26.300 dan jumlah komentar sebanyak 966. Adapun follower Instagram hingga TW IV 2025 sebanyak 25.500 akun.

- b. Pembuatan dan Penyebaran Siaran Pers Ditjen PDSPKP secara rutin menyusun dan menyebarkan siaran pers resmi sebagai sarana utama dalam menyampaikan informasi kepada publik. Siaran pers ini berfokus pada upaya penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan, serta menjadi media klarifikasi terhadap isu-isu yang berpotensi menimbulkan persepsi negatif di masyarakat maupun di kalangan mitra internasional.

Isi dari siaran pers mencakup:

- Data capaian program dan kegiatan Ditjen PDSPKP, seperti perkembangan ekspor hasil perikanan, realisasi bantuan sarana prasarana, hasil pendampingan pelaku usaha, serta keberhasilan daerah dalam meningkatkan nilai tambah produk.
- Informasi aktual dan faktual, misalnya kebijakan terbaru, kegiatan promosi dagang, hasil kerja sama dengan mitra strategis, serta langkah pemerintah dalam menjaga mutu, keamanan pangan, dan keberlanjutan sumber daya perikanan.
- Penjelasan atau klarifikasi terhadap isu sensitif, seperti pemberitaan negatif terkait produk ekspor, agar masyarakat dan pelaku usaha mendapatkan pemahaman yang benar dan proporsional.

Penyebaran siaran pers dilakukan melalui berbagai kanal, baik media massa nasional dan daerah, portal resmi Kementerian Kelautan dan Perikanan, maupun media sosial Ditjen PDSPKP, sehingga informasi dapat menjangkau khalayak luas secara cepat dan konsisten. Selama TW IV 2025, telah menyusun siaran pers sebanyak 11 berita dari total 52 berita selama satu tahun 2025.

c. Penempatan Pemberitaan (*Media Placement*)

Melakukan kerja sama dengan media massa nasional dan daerah untuk menempatkan pemberitaan positif mengenai program, capaian, dan keberhasilan Ditjen PDSPKP. Strategi ini dilakukan agar informasi dapat menjangkau masyarakat luas dan membangun persepsi publik yang konstruktif terhadap sektor kelautan dan perikanan.

d. Pembuatan dan Penayangan Materi Video

Mengembangkan berbagai materi video informatif dan inspiratif yang menampilkan potensi produk, pelaku usaha, serta inovasi di bidang kelautan dan perikanan. Konten tersebut disebarluaskan melalui media sosial, kanal YouTube Ditjen PDSPKP, serta platform Neptune TV yang tayang di Biznet IPTV, IndiHome TV, Vidio, dan YouTube. Selama TW IV 2025, membuat 1 produksi video Neptune TV berjudul *Mwiti, Langkah Awal dari Bogor*. Sedangkan video yang telah diproduksi dan tayang di Youtube Ditjen PDSPKP sebanyak 22 video

e. Pelaksanaan Layanan Keterbukaan Informasi Publik (KIP)

Layanan informasi publik diselenggarakan secara cepat dan responsif untuk memberikan klarifikasi, tanggapan, serta pelayanan atas permohonan informasi dari masyarakat. Sebagai wujud komitmen terhadap transparansi, pada Tahun 2025 Direktorat Jenderal PDSPKP telah mengikuti kegiatan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dan berhasil meraih predikat “Informatif”, yang merupakan kategori tertinggi dalam penilaian keterbukaan informasi publik.

f. Mendukung Penyelenggaraan Konferensi Pers, *Doorstop* dan Bincang Bahari

Selama pada 2025 Ditjen PDSPKP, telah mendukung 2 penyelenggaraan konferensi pers pada tanggal 6 November 2025 bertema Update Penanganan Isu Cs-137 pada produk Udang Indonesia dan tanggal 11 Desember 2025 bertema Capaian Kinerja Ditjen PDSPKP Tahun 2025; 2 penyelenggaraan *doorstop* pada tanggal 20 November 2025 untuk acara *Investment and Business*

Matching, 23 November 2025 untuk acara peringatan Hari Ikan Nasional; dan 1 penyelenggaraan Bincang Bahari pada tanggal 19 November 2025 untuk peringatan Hari Ikan Nasional dengan tema Protein Ikan untuk Generasi Emas 2045.

- g. Pendokumentasian Kegiatan Sebagai Bahan Publikasi dan Konten Digital.

Melaksanakan dokumentasi seluruh kegiatan Ditjen PDSPKP baik di tingkat pusat maupun daerah untuk menjadi bahan pembuatan konten publikasi digital. Dokumentasi ini mendukung keberlanjutan produksi konten positif dan menjadi arsip komunikasi publik yang memperkuat akuntabilitas dan keterbukaan informasi lembaga.

Tabel 22. Rekapitulasi Jumlah Pemberitaan Ditjen PDSPKP Berdasarkan Tone Pemberitaan

Bulan	Sifat/Tendensi Pemberitaan			Total
	Positif	Negatif	Netral	
Oktober	20	0	21	41
November	40	0	25	65
Desember	26	0	13	39
Total	86	0	59	145

Tidak adanya pemberitaan negatif pada Tahun 2025 mencerminkan efektivitas strategi komunikasi publik Direktorat Jenderal PDSPKP yang terencana dan konsisten. Melalui penguatan narasi positif, keterbukaan informasi, serta kolaborasi dengan media dan pemangku kepentingan, Ditjen PDSPKP berhasil menjaga reputasi kelembagaan dan memperkuat kepercayaan publik. Capaian ini akan terus dipertahankan dan ditingkatkan sebagai wujud komitmen terhadap komunikasi publik yang akuntabel dan transparan.

Dalam rangka pencapaian indikator kinerja ini, Sekretariat Ditjen PDSPKP telah merealisasikan anggaran sebesar Rp194.422.352, atau setara dengan 99,72% dari pagu anggaran sebesar Rp194.971.000, dengan efisiensi anggaran sebesar Rp548.648.

C. Realisasi Anggaran

Pada tahun 2025, alokasi anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan yang dikelola (pagu anggaran awal) adalah sebesar Rp89.214.766.000 (delapan puluh sembilan miliar dua ratus empat belas juta tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah) yang seluruhnya merupakan APBN rupiah murni. Terdapat efisiensi sebesar Rp15.914.841.000 (lima belas miliar sembilan ratus empat belas juta delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah) sehingga pagu efektif Setditjen PDSPKP menjadi sebesar Rp73.299.925.000 (tujuh puluh tiga miliar dua ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah), dengan realisasi sebesar Rp71.952.023.000 (tujuh puluh satu miliar sembilan ratus lima puluh dua juta dua puluh tiga ribu rupiah), setara dengan 80,65% terhadap pagu awal dan 98,16% terhadap pagu anggaran efektif.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Secara umum Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat Direktorat Jenderal PDSPKP Tahun 2025 telah menyajikan program dan kegiatan dalam mencapai sasaran dan indikator kinerja kegiatan yang baik dengan ditunjukkan nilai Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar 110,21% yang termasuk dalam kategori “Istimewa”.

Namun demikian upaya perbaikan peningkatan kinerja tetap akan dilakukan secara berkelanjutan oleh seluruh jajaran Sekretariat Ditjen PDSPKP antara lain melalui perencanaan dan penganggaran yang baik, ketatalaksanaan yang efisien, pengembangan dan pembinaan SDM yang profesional, peningkatan akuntabilitas, penerapan budaya kerja yang baik dan pelaporan yang tertib, sehingga pada akhirnya mampu mewujudkan visi yang telah ditetapkan.

Laporan Kinerja ini juga diharapkan dapat menjadi salah satu bahan kebijakan dalam penyusunan dan implementasi Rencana Kerja (Operational Plan), Rencana Kinerja (Performance Plan), Rencana Anggaran (Financial Plan), dan Rancangan Rencana Strategis (*Strategic Plan*) Ditjen PDSPKP.

B. Permasalahan dan Rekomendasi

Berdasarkan hasil pengukuran atas kinerja Setditjen PDSPKP pada tahun 2025, seluruh indikator kinerja Sekretariat Ditjen PDSPKP yang penghitungannya dilakukan secara triwulanan dan semesteran telah mencapai target.

C. Tindaklanjut atas Rekomendasi Pada Laporan Kinerja Triwulan III Tahun 2025

Berdasarkan hasil pengukuran atas kinerja Setditjen PDSPKP Triwulan III tahun 2025, seluruh indikator kinerja kegiatan yang penghitungannya dilakukan secara triwulanan dan semesteran telah mencapai target.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Perjanjian Kinerja Setditjen PDSPKP Tahun 2025



Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Machmud**

Jabatan : Sekretaris Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : **Machmud**

Jabatan : Plt. Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan

Selaku atasan Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 8 Desember 2025

Pihak Kedua,
Plt. Direktur Jenderal Penguatan Daya
Saing Produk Kelautan dan Perikanan

Machmud

Pihak Kesatu,
Sekretaris Direktorat Jenderal
Penguatan Daya Saing Produk Kelautan
dan Perikanan

Machmud

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN DAYA SAING
PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET
1.	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel dalam Bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan	1.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Persen)	85
		2.	Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LK Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Persen)	≤0,5
		3.	Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Program Prioritas/Strategis Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Persen)	81
		4.	Nilai Pembangunan Integritas Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Nilai)	76
		5.	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Nilai)	86
		6.	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Nilai)	92
		7.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Nilai)	81,5
		8.	Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Nilai)	3,5
		9.	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Indeks)	81
		10.	Persentase penyelesaian program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (Persen)	100
		11.	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Nilai)	80
		12.	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Persen)	76

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET
		13. Persentase Penyelesaian Proses Bisnis Level 2 dan 3 serta SOP Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Persen)	65
		14. Nilai Proposal Inovasi Pelayanan Publik Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Nilai)	77
		15. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Persen)	91
		16. Pemenuhan Layanan Perkantoran Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Layanan)	12
		17. Persentase Penyelesaian Permasalahan Hukum Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Persen)	100
		18. Persentase Dokumen Kerja sama yang disusun/ditindaklanjuti oleh Ditjen PDSPKP (Persen)	80
		19. Rasio Jumlah Pemberitaan Negatif Bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan terhadap Total Pemberitaan Bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (Persen)	≤5

Data Anggaran :

PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
<i>PROGRAM : Dukungan Manajemen</i>	
Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen PDSPKP	89.214.766.000
Total Anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Tahun 2025	89.214.766.000

Jakarta, 8 Desember 2025

Pihak Kedua,
Plt. Direktur Jenderal Penguatan Daya
Saing Produk Kelautan dan Perikanan



Machmud

Pihak Kesatu,
Sekretaris Direktorat Jenderal Penguatan
Daya Saing Produk Kelautan dan
Perikanan



Machmud